



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

# PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2024



**STOP !  
KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**



**KESETARAAN  
GENDER  
DI INDONESIA**



**INDONESIA MENYUKAI SIKSIS  
KEMERDEKAAN DAN DIA KAGELAN, JIKA  
TERJALANNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK.**

---

**Kejadian kekerasan gender diukur dari  
gender gap. Indonesia berada  
pada ranking ke-97. Indikator  
gender gap sendiri terdiri dari 4  
hal.**

**CARA MENGURANGI TINGKATNYA  
KEKERASAN GENDER**

- 1. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua identitas gender
- 2. Adanya ruang dialogis yang dilayani perbedaan gender
- 3. Meningkatkan kesadaran kolektif
- 4. Memberikan dukungan positif





---

## KATA PENGANTAR

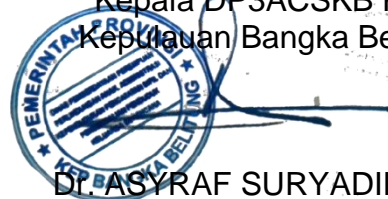
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “**Profil Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024**”. Serta Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Dalam buku ini disajikan gambaran tentang perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh banyak mendapatkan dukungan/ bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghaturkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku “Profil Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024”. Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan buku ini belum lah sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Pangkalpinang , 2024

Kepala DP3ACSKB Prov.  
Kepulauan Bangka Belitung



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd  
196605041995121002

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	5
C. Sumber data .....	6
D. Sistematika Penyajian .....	6
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	9
A. Keadaan geografis daerah .....	9
B. batas wilayah .....	10
C. Luas wilayah .....	10
D. Topografi .....	10
E. Kondisi demografis daerah.....	12
F. Gambaran ekonomi daerah .....	12
G. Potensi unggulan daerah .....	15
BAB III STRUKTUR PENDUDUK .....	33
A. Jumlah Penduduk .....	33
B. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.	34
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial .....	35
BAB IV GAMBARAN GENDER DI BANGKA BELITUNG .....	41
A. IPM, IPG DAN IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	41
B. Partisipasi perempuan .....	47
C. Gender bidang Pendidikan .....	49
D. Gender bidang Ekonomi dan Sosial.....	55
E. Gender bidang kesehatan.....	66
F. Kualitas Keluarga .....	69
BAB V GAMBARAN KESEHJAHTRAAN ANAK DI PROVINSI BANGKA BELITUNG .....	75
A. Kondisi kesejahteraan anak .....	75
B. Pendidikan anak.....	79
C. Kepemilikan Akta Kelahiran .....	86
D. Data status Perkawinan pada anak (usia <18 tahun) di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 .....	87
E. Kesehatan Anak .....	89

---

BAB VI	GAMBARAN KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BANGKA BELITUNG .....	95
A.	Gambaran kondisi kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban .....	97
B.	Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Usia Korban dan Jenis Kelamin .....	102
C.	Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian .....	104
D.	Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Hubungan/Relasi Korban dengan Pelaku.....	106
BAB VII	PENUTUP.....	107
A.	Kesimpulan .....	107
B.	Saran .....	107

---

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	4
TABEL II.1	Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 .....	11
TABEL II.2	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ton), 2018-2022 .....	16
TABEL II.3	Produksi Padi dan Beras Tahun 2023 di Provinsi Bangka Belitung .....	17
TABEL II.4	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 .....	18
TABEL II.5	Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	19
TABEL II.6	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	21
TABEL II.7	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2022 .....	22
TABEL II.8	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 .....	23
TABEL II.9	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Bulan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.....	25
TABEL III.1	Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut wilayah dan jenis kelamin .....	33
TABEL III.2	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	34
TABEL III.3	Distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023.....	35
TABEL III.4	Distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	36
TABEL III.5	Distribusi penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	36
TABEL III.6	Penduduk penyandang cacat menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	37
TABEL III.7	Penduduk penyandang cacat menurut Jenis Kelamin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	38
TABEL III.8	Distribusi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut status kawin dan jenis kelamin, Semester II Tahun 2023.....	38
TABEL III.9	Distribusi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut status kawin dan kabupaten, Semester II Tahun 2023.....	39
TABEL III.10	Rata-rata Usia Kawin Pertama Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	40
TABEL IV.1	Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023 .....	41
TABEL IV.2	Indeks Pembangunan Manusia (Perempuan) Tahun 2019 s.d 2023 .....	42
TABEL IV.3	Indeks Pembangunan Manusia (Laki-laki) Tahun 2019 s.d 2023.....	43
TABEL IV.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 s.d 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	44
TABEL IV.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2014 s.d 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	46
TABEL IV.6	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif periode tahun 2020-2021 .....	47
TABEL IV.7	Persentase Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin (Persen).....	48

TABEL IV.8	Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis .....	50
TABEL IV.9	Angka Partisipasi Kasar/ Gross Enrollment Ratio .....	51
TABEL IV.10	Angka Partisipasi Murni/ Net Enrollment Ratio .....	52
TABEL IV.11	Angka Putus Sekolah murid menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. ....	52
TABEL IV.12	Rata-rata lama sekolah Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	54
TABEL IV.13	Rata-rata lama sekolah Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	55
TABEL IV.14	Pengeluaran per kapita Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019 s.d 2023.....	55
TABEL IV.15	Pengeluaran per kapita laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019 s.d 2023 .....	56
TABEL IV.16	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023.....	57
TABEL IV.17	Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023.....	58
TABEL IV.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	59
TABEL IV.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023 .....	59
TABEL IV. 20	Tingkat Pengangguran terbuka .....	60
TABEL IV. 21	Pekerjaan Perempuan yang paling banyak diminati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	62
TABEL IV. 22	Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin (Persen) .....	63
TABEL IV. 23	Angka penyandang Cacat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	64
TABEL IV. 24	Penduduk Miskin Penerima Jaminan kesehatan .....	65
TABEL IV. 25	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023.....	66
TABEL IV. 26	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Posyandu, Klinik dan Polindes di Bangka Belitung.....	67
TABEL IV. 27	Angka Harapan Hidup Perempuan di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 sd 2021 .....	68
TABEL IV. 28	Angka Harapan Hidup laki-laki di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 sd 2021 .....	68
TABEL IV.29	Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/MMR).....	69
TABEL IV.30	Kepala Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Jenis Kelamin.....	71
TABEL IV.31	Kepala Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Status Kawin dan Jenis Kelamin .....	72
TABEL IV.32	Karakteristik Kepala Keluarga menurut Pendidikan.....	73
TABEL IV.33	Distribusi Kepala Keluarga menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2022.....	74
TABEL V.1	Jumlah anak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.....	75
TABEL V.2	Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA tahun 2019 s.d 2021 .....	80
TABEL V.3	Angka Partisipasi Murni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA tahun 2019 s.d 2021 .....	81
TABEL V.4	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA tahun 2019 s.d 2023.....	83

---

TABEL V.5	Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA.....	85
TABEL V.6	Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran.....	86
TABEL V.7	Jumlah Kepemilikan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting lainnya .....	87
TABEL V.8	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) di Bangka Belitung dari tahun 2018 s.d 2023.....	89
TABEL V.9	Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) .....	90
TABEL V.10	Angka Kematian Neonatal (NNDR) .....	91
TABEL V.11	Angka kematian post neonatal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	91
TABEL V.12	Angka Kematian Balita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	92
TABEL VI.1	Rekap Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Anak Dan Dewasa Tahun 2023 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	96
TABEL VI.2	Rekap Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Anak Dan Dewasa Tahun 2023 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	97
TABEL VI.3	Data Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2023.....	99
TABEL VI.4	Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan usia diatas 18 tahun berdasarkan bentuk kekerasan, 2023 .....	101
TABEL VI.5	Jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, 2023.....	103
TABEL VI.6	Data Kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian, 2023.....	105
TABEL VI.7	Jumlah kekerasan pada perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan tempat kejadian, 2023.....	106
TABEL VI.8	Jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan hubungan/relasi korban dengan pelaku, 2021 (salah NI).....	107
TABEL VI.9	Jumlah korban kekerasan pada perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan hubungan pelaku dengan korban, 2023.....	108

---

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	9
GAMBAR II.2	Grafik Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung .....	13
GAMBAR II.2	PDRB Bangka Belitung .....	15
GAMBAR II.4	Produksi Padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten (Ribuan Ton-GKG), 2022 dan 2023 .....	18
GAMBAR IV.1	Capaian Indeks Kualitas Keluarga tahun 2023 .....	70
GAMBAR V.1	Indeks Perlindungan Anak Tahun 2023 .....	77
GAMBAR V.2	Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 .....	78
GAMBAR V.3	Indeks Perlindungan Hak-hak Anak Tahun 2023 .....	79
GAMBAR V.4	Prevalensi Balita stunting provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 .....	98
GAMBAR V.5	Prevalensi Balita stunting Perkab/kota di provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021- 2023 .....	96
GAMBAR V1.1	Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami perkab/kota, 2023 .....	100
GAMBAR V1.2	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan usia 18 tahun ke atas berdasarkan bentuk kekerasan perkab/kota, 2021 .....	102
GAMBAR V1.3	Jumlah korban kekerasan berdasarkan usia dan jenis kelamin per kab/kota, 2023 .....	104

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara alamiah telah diketahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki struktur otak yang berbeda (Wood1994: 38). Gender juga diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan di masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan *gender* dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Isu gender sendiri mulai muncul pada akhir dekade pemerintahan orde baru. Karena baru tercipta konsep dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan akhirnya dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Pembangunan Bangsa Indonesia di masa depan diharapkan tidak lagi mendiskriminasikan gender. Diskriminasi gender dapat menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan/ atau anak perempuan serta berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan/ atau anak perempuan.

Kesetaraan *Gender (genderequity)* lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagaimana manusia dalam berperan dan berpartisipasi disegala bidang. Jadi kesetaraangender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*genderequality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam

---

menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Selain permasalahan dan isu gender permasalahan anak juga menjadi urusan yang sangat penting. Sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, bahwa setiap anak mempunyai untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat perlindungan dan berpartisipasi. Sehingga negara berkewajiban untuk memastikan seluruh anak Indonesia terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Orang tua, organisasi dan negara harus selalu menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi

---

pembangunan perlindungan anak. Perlindungan anak sudah merupakan komitmen bersama semua negara, terutama negara-negara yang meratifikasi konvensi hak anak. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) hingga tahun 2030, yaitu: Tujuan 1, Tidak Ada Anak yang Harus Hidup dalam Kemiskinan; Tujuan 2, Tidak Ada Anak yang Kekurangan Gizi; Tujuan 3, Tidak Ada Ibu atau Anak yang Meninggal karena Penyebab yang Dapat Dicegah; Tujuan 4, Setiap Anak Harus Memperoleh Manfaat dari Lingkungan Pembelajaran yang Efektif dan Inklusif; Tujuan 5, Setiap Anak Harus Memiliki Akses yang Sama untuk Mendapat Kesempatan, Terlepas dari Kesenjangan Gender; Tujuan 6, Setiap Anak Berhak untuk Mendapatkan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi; Tujuan 13, Tidak Ada Anak yang Harus Menderita karena Efek Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan; dan Tujuan 16, Tidak Ada Anak yang Hidup dalam Ketakutan.

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 sebanyak 1.521.723 jiwa yang terdiri dari 779.677 jiwa laki-laki dan 742.046 jiwa perempuan. Kemudian Rasio jenis kelamin atau Sex Ratio di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester II tahun 2023 sebesar 105 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

**Tabel I.1** Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN	PEREMPUAN (%)	TOTAL
0-4Thn	57.838	7,4	54.329	7,3	112.167
5-9Thn	70.316	9,0	64.915	8,7	135.231
10-14Thn	75.613	9,7	70.887	9,6	146.500
15-19Thn	61.791	7,9	60.057	8,1	121.848
20-24Thn	64.084	8,2	61.919	8,3	126.003
25-29Thn	58.106	7,5	55.197	7,4	113.303
30-34Thn	58.790	7,5	57.319	7,7	116.109
35-39Thn	65.980	8,5	63.371	8,5	129.351
40-44Thn	68.518	8,8	62.460	8,4	130.978
45-49Thn	53.787	6,9	48.632	6,6	102.419
50-54Thn	44.371	5,7	40.109	5,4	84.480
55-59Thn	32.762	4,2	31.366	4,2	64.128
60-64Thn	26.293	3,4	26.098	3,5	52.391
65-69Thn	19.438	2,5	19.826	2,7	39.264
70-74Thn	12.022	1,5	12.433	1,7	24.455
>74Thn	9.968	1,3	13.128	1,8	23.096
<b>JUMLAH</b>	<b>779.677</b>	<b>100,0</b>	<b>742.046</b>	<b>100,0</b>	<b>1.521.723</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa investasi untuk anak lebih dari sepertiga penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di masa yang akan datang. Mereka adalah kelompok yang harus dipersiapkan untuk menjaga kelangsungan negara dan bangsa dimasa depan.

Karena itulah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 yang mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data

---

dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data dan informasi yang dimaksud akan disusun secara terstruktur berdasarkan aspek yang mempengaruhi untuk memudahkan pengolahan data serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Selain itu berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 5 Tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa “Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk: 1. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir; 2. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan 3. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah”. Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “**Profil Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024**” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara menyeluruh diberbagai bidang.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan anak adalah menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan terkait dengan masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, social ekonomi lainnya, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Provinsi Kepulauan

---

Bangka Belitung yang diamati dari aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak disabilitas.

**C. Sumber Data**

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Catatan Sipil dan pengendalian penduduk, keluarga berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian PPPA RI

**D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber data
- D. Sistematika Penyajian

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- A. Keadaan geografis daerah
- B. batas wilayah
- C. Luas wilayah
- D. Topografi
- E. Kondisi demografis daerah
- F. Gambaran ekonomi daerah
- G. Potensi unggulan daerah

**BAB III STRUKTUR PENDUDUK**

- A. Jumlah Penduduk

- 
- B. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.
  - C. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)
  - D. Angka Pertumbuhan Penduduk
  - E. Keluarga
  - F. Kualitas Penduduk
  - G. Mobilitas Penduduk
  - H. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

BAB IV GAMBARAN GENDER DI BANGKA BELITUNG

- A. IPM, IPG DAN IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- B. Partisipasi perempuan
- C. Gender bidang Pendidikan
- D. Gender bidang Ekonomi dan Sosial
- E. Gender bidang kesehatan
- F. Kualitas Keluarga

BAB V GAMBARAN KESEHJAHTRAAN ANAK DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

- A. Kondisi kesejahteraan anak
- B. Pendidikan anak
- C. Kepemilikan Akta Kelahiran
- D. Data status Perkawinan pada anak (usia <18 tahun) di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023
- E. Kesehatan Anak

BAB VI GAMBARAN KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BANGKA BELITUNG

- A. Gambaran kondisi kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban
- B. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Usia Korban dan Jenis Kelamin
- C. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Hubungan/Relasi Korban dengan Pelaku
- D. Kesehatan Anak

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **A. KEADAAN GEGOGRAFIS DAERAH**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50'sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang disekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil

yang mengitari Pulau Bangka antara lain Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, dan Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk gunung Maras mencapai 699 meter, gunung Tajam ketinggiannya kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Untuk daerah perbukitan seperti bukit Menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter dan bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata dibawah 5, akan tetapi memiliki kandungan aluminium yang sangat tinggi. Didalamnya mengandung banyak mineral biji timah dan bahan galian berupa pasir, pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dll.

Gambar. 2.1 Peta Wilayah Kepulauan Bangka Belitung



---

Tahun 2024 kelembapan udara Bangka Belitung rata-rata berkisar diantara 50-98 persen dengan rata-rata kelembapan 90 Persen. Sementara jika di bagi menjadi 2 pulau dengan mengambil 2 kabupaten/kota di ke dua pulau dapat di ukur melalui wilayah Pangkalpinang rata-rata berkisar antara 51-98 persen dengan rata-rata kelembapan udara sebesar 82%. Sedangkan kelembapan udara di Kota Tanjungpandan rata-rata 84%. Sementara suhu udara di Bangka Belitung rata-rata tahun berkisar di Kota Pangkalpinang berkisar antara 23,4°C - 32,1°C dengan rata-rata suhu udara sebesar 27,0°C. .

#### B. BATAS WILAYAH

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata disebelah Timur
- Laut Jawa disebelah Selatan
- Selat Bangka disebelah Barat
- Laut Natuna disebelah Utara

#### C. LUAS WILAYAH

Luas wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,06 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa.

#### D. TOPOGRAFI

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas datar mencapai luas sekitar 46,19% bergelombang 41,08% dan tersebar di Pulaun Bangka dan sisanya 12,37% merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras (Kabupaten Bangka) dengan ketinggian 699 Meter dan di Pulau Belitung titik perbukitan tertinggi pada puncak Gunung Tajam (Kabupaten Belitung) dengan ketinggian ± 500 Meter di atas permukaan laut.

Keadaan PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata dibawah 5, akan tetapi mengandung alumunium yang sangat tinggi yang didalamnya banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian berupa pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat dan lain-lain.

**Tabel II.1 Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ibukota Kabupaten/Kota Capital of Regency/Municipality	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Bangka	Sungailiat	3 016,85
Belitung	Tanjungpandan	2 270,70
Bangka Barat	Muntok	2 851,41
Bangka Tengah	Koba	2 259,98
Bangka Selatan	Toboali	3 598,24
Belitung Timur	Manggar	2 588,82
Pangkalpinang	Pangkalpinang	104,54
<b>Kep. Bangka Belitung</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>16 690,54</b>

Sumber: Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2023

#### E. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

- Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 1.521.723 Jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 779.677 Jiwa dan Perempuan sebanyak 742.046 Jiwa. Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi laki-laki.
- Tingkat pertumbuhan penduduk periode semester I – semester II tahun 2020 adalah sebesar 1,21 %. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 84 Jiwa per Kilometer persegi, dengan tingkat

- 
- kepadatan tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yaitu 2.260 orang penduduk untuk setiap kilometer persegi.
  - Berdasarkan data BPS Jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja (15-64) tahun 2024 adalah sebanyak 818.626 Jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 70,66% pada february 2024, naik sebesar 0,33 persen poin, yaitu dari 70,33% dibandingkan pada Februari 2023. I

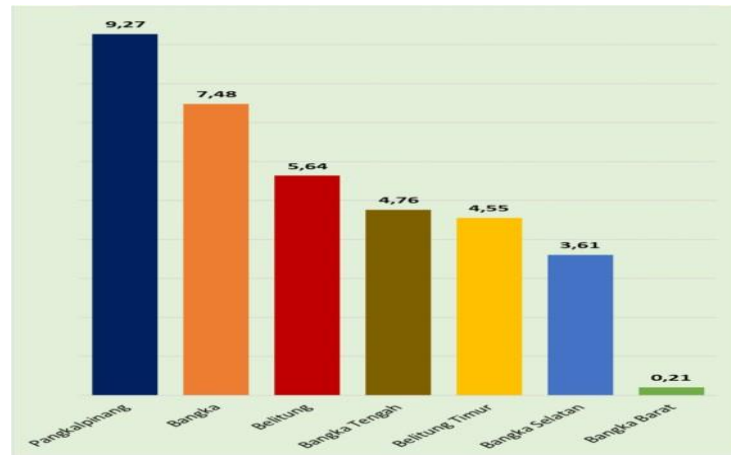
#### F. GAMBARAN EKONOMI DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di Bidang Ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 adalah 4,38 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4,40 persen. Terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023: Jasa keuangan dan asuransi: 13,90 persen, Informasi dan komunikasi: 13,82 persen, Jasa lainnya: 10,97 persen. Sementara itu, industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar, namun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ini disebabkan oleh kontraksi pada subkategori industri logam dasar. Hal ini dipengaruhi oleh harga logam timah yang rendah di pasar dunia dan penertiban tata kelola pertimahan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 relatif membaik. Namun, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai penopang Perekonomian Bangka Belitung, di tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini sangat jarang terjadi selama beberapa tahun ini. Meskipun demikian, kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tinggi terhadap PDRB total. Di sisi pengeluaran, terlihat adanya kontraksi pada impor luar negeri.

Gambar. 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021



Sumber: Prov Bangka Belitung dalam angka Tahun 2021

### **PDRB dan Struktur Perekonomian**

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah yang disusun menurut komponen lapangan usaha yang merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang diciptakan oleh berbagai aktifitas sector ekonomi dan komponen pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) didasarkan harga pada setiap tahun.

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha ADHB pada tahun 2017 PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

---

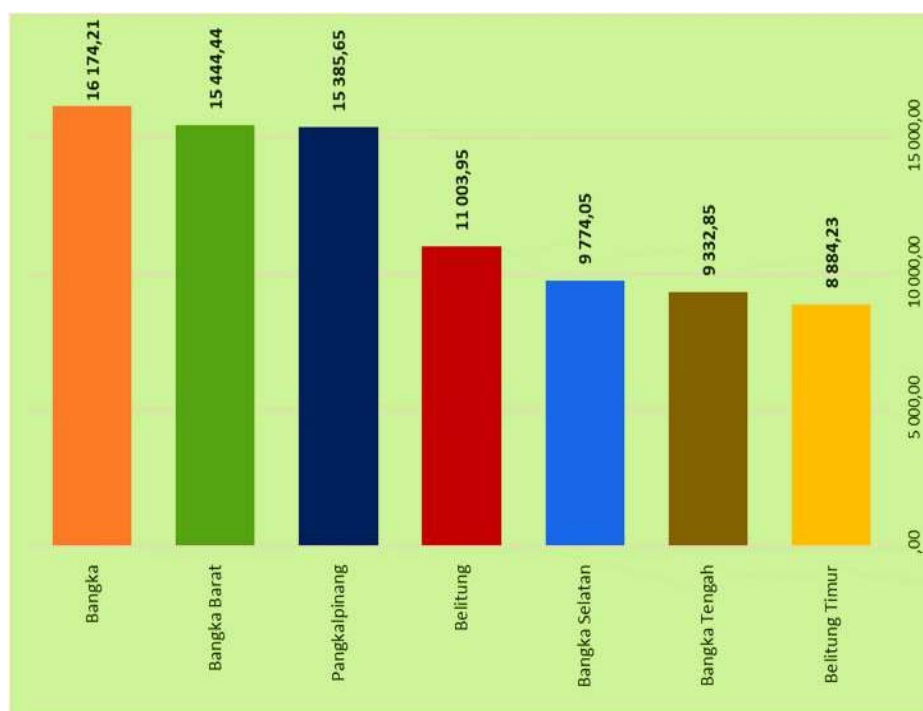
Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha ADHB pada tahun 2016 struktur perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 20,06% walaupun mengalami penurunan rata-rata -4,69% pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,00% yang rata-rata meningkat sebesar 2,72% pertahunnya dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,81% yang meningkat 1,83% pertahun.

### **PDRB Perkapita**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Performa ekonomi wilayah pada umumnya digambarkan oleh PDRB. Struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha atau pengeluaran tergambar dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Sementara pertumbuhan ekonomi terlihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp85,94 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp55,36 triliun. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen setelah sempat berkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 2,30 persen sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah kembali bangkit yang terlihat dari pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha maupun seluruh komponen pengeluaran. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,16 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,62 persen serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,42.

Dari sisi pengeluaran, contributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komponen neraca perdagangan, dimana komponen ekspor tumbuh lebih tinggi dibandingkan impor yang merupakan faktor pengurang.

Gambar. 2.3 Grafik PDRB Bangka Belitung 2021



Sumber: Prov. Bangka Belitung dalam angka 2022 (BPS)

Untuk diketahui terkait PDRB perkapita pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 41.576.000 terjadi kenaikan PDRB Perkapita tiap tahunnya yang menandakan bahwa perekonomian masyarakat semakin meningkat.

## G. Potensi Unggulan Daerah

### a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

#### 1. Lahan dan Kehutanan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Pembangunan pada sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan di pedesaan. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah ke arah itu adalah dengan menerapkan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

**Tabel II.2 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ton), 2018-2023**

Jenis Tanaman KindofPlants	2018	2019	2020	2021	2022x	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tanaman Tahunan</b>						
<b>Perennial Crops</b>						
Karet/Rubber	55 625,30	56 529,15	54 683,20	49 317,49	49 451,09	45197,6
Kelapa/Coconut	4 379,79	4 798,18	4 666,40	4 843,30	4 882,24	4996,1
Kelapa sawit/Oil palm	142 495,01	147 330,45	158 477,73	179 618,66	183 791,12	213515
Kopi/Coffee	9,27	11,40	20,70	38,63	54,41	23,7
Kakao/Cocoa	303,39	145,40	333,10	352,50	323,25	295,4
Teh/Tea	-	-	-	-	-	-
Jambu mete/Cashew nut	1,88	6,17	0,72	0,17	0,11	0,1
Pala/Nutmeg	-	-	-	-	-	-
Lada/Pepper	32 811,06	33 457,64	29 440,94	27 166,60	27 376,16	24848,8
<b>Tanaman Semusim</b>						
<b>Seasonal Crops</b>						
Tebu/Sugar cane	-	-	-	-	-	-
Tembakau/Tobacco	-	-	-	-	-	-
Nilam/Patchouli	-	-	-	-	-	-

Bangka Belitung, petani tradisional umumnya menanam Lada dan Karet. Sementara perusahaan dan petani plasma menggarap perkebunan sawit. Daerah lainnya terkenal dengan produk Nanas. Selain perkebunan, perikanan tangkap Babel juga berpotensi besar untuk dikembangkan. Beras merah hasil olahan padi dari penjuruk Bangka kian dicari masyarakat. Setiap panen raya, beras merah sudah diborong habis dari penggilingan. Luas panen padi di Bangka Belitung terus bertambah seiring upaya pemerintah mencetak lahan sawah. Luas panen padi pada 2023 mencapai 15.285 hektare, mengalami peningkatan sebanyak 177 hektare atau 1,17 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 15.108 hektare. Produksi padi pada 2023 yaitu sebesar 66.469 ton GKG, mengalami peningkatan sebanyak 5.044 ton atau 8,21 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 61.425 ton GKG. Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 39.398 ton, mengalami peningkatan sebanyak 2.989 ton atau 8,21 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 36.409 ton. (BPS,2024)

**TABEL II.3 PRODUKSI PADI DAN BERAS TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Uraian/Periode Waktu	2022	2023	Perkembangan 2023 terhadap 2022	
			Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Luas Panen (Hektare)</b>				
Januari–April	3.322	6.015	2.693	81,07
Mei–Agustus	5.882	3.274	-2.608	-44,34
September–Desember	5.904	5.996	92	1,56
<b>Januari–Desember</b>	<b>15.108</b>	<b>15.285</b>	<b>177</b>	<b>1,17</b>
<b>Produksi Padi (Ton GKG)</b>				
Januari–April	11.032	27.691	16.659	151,01
Mei–Agustus	25.378	13.499	-11.879	-46,81
September–Desember	25.015	25.279	264	1,06
<b>Januari–Desember</b>	<b>61.425</b>	<b>66.469</b>	<b>5.044</b>	<b>8,21</b>

Sumber: BPS, 2024

Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2023 terjadi di beberapa kabupaten yaitu di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah. Di sisi lain, beberapa kabupaten mengalami penurunan produksi padi yang cukup besar yaitu di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung. Tiga kabupaten dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2023 adalah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat. Sementara itu, tiga kabupaten dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

**Gambar 2.4 Produksi Padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten (Ribu Ton-GKG), 2022 dan 2023**



Untuk Kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas total sebesar 657.378,26 Ha, pengguna terbesarnya dipakai untuk Hutan Lindung dengan luas 184.276,93 Ha, untuk Hutan Produksi seluas 436.647,89 Ha dan Hutan Konservasi seluas 35.760,84

**Tabel II.4 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021**

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal, and Marine Ecosystem			
Kabupaten/Kota	Suaka Alam dan Hutan Produksi	Hutan Lindung	Pelestarian Alam Terbatas
Regency/Municipality	Protection Forest Sanctuary	Limited Production	Reserve and Nature Conservation Area
(1)	(2)	(3)	(4)
Bangka	16 391	15 935	–
Belitung	40 598	2 574	–
Bangka Barat	29 393	7 236	–
Bangka Tengah	27 390	3 146	–
Bangka Selatan	27 390	3 146	–
Belitung Timur	42 950	–	–
Kota Pangkalpinang	–	–	–
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>184 112</b>	<b>32 038</b>	<b>–</b>

Sumber: Bangka Belitung dalam angka 2023

## 2. Potensi Perikanan

Pada tahun 2020, PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp75,53 triliun. Lebih dari seperlima PDRB Kepulauan Bangka

Belitung berasal dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,47 persen). Disusul oleh Industri Pengolahan dengan persentase sebesar 18,76 persen.

Untuk produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 207,442 Ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp 5,9 Triliun, untuk nilai tangkapan terbanyak ada pada Kabupaten Belitung sebesar 52,912 Ton akan tetapi untuk nilai ekonomi tertinggi ada di Kabupaten Belitung Timur dengan nilai Rp 1,4 Triliun walaupun nilai volume

Tabel II.5 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perikanan Tangkap <i>Fish Capture</i>	
	Volume <i>Value</i>	Nilai <i>Value</i>
	(Ton) (6)	(000 Rp) (7)
(1)		
Bangka	26.994	1.065.482.765
Belitung	52.912	628.075.506
Bangka Barat	19.342	632.902.236
Bangka Tengah	27.955	1.083.298.634
Bangka Selatan	39.134	1.111.597.877
Belitung Timur	40.079	1.416.546.895
Pangkalpinang	1.026	38.370.159
<b>Kep.Bangka Belitung</b>	<b>207.442</b>	<b>5.976.274.072</b>

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2021

### 3. Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB)

---

Indonesia. Potensi ekonomi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam publikasi ini adalah sektor pertambangan dan Penggalian, serta pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air. Perkembangan ekonomi di wilayah ini, masih mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Hal ini tergambar pada sektor pertambangan dan Penggalian yang menjadi sektor unggulan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di sektor pertambangan, karena mengandung bijih timah beserta mineral ikutannya dan mineral bukan logam yang tersebar secara merata antara lain pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain.

Pertambangan timah merupakan sektor yang mendominasi perekonomian dan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi terkini mengenai potensi sumber daya mineral bersumber pada data Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG) tahun 2014 menunjukkan bahwa tonase sumber daya mineral timah masih cukup besar, begitupun mineral ikutannya yaitu monasit dan xenotim.

Pertambangan dan Penggalian merupakan salah satu lapangan usaha yang peranannya cukup besar bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingat komoditi timah yang masih menjadi ciri khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga tahun 2018, Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar ke-4 terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2019-2021 posisinya tergeser ke posisi kelima. Seiring dengan semakin ketatnya aturan dalam penambangan timah, peranannya terus mengalami penurunan hingga di tahun 2020 hanya mencapai 8,56 persen. Namun pada tahun 2021 harga timah mengalami kenaikan sehingga membuat minat masyarakat untuk melakukan penambangan timah juga meningkat. Hal ini menyebabkan peranan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 9,54 persen.

**Tabel II.6. Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Lapangan Usaha	2017	2018r	2019*	2020**	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B Pertambangan dan Peng- galian</b>					
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	6,66	7,72	8,35	4,79	5,69
2 Pertambangan Batuba- ra dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pertambangan Bijih Logam					
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	66,52	63,19	58,54	58,17	63,61
	26,82	29,09	33,11	37,04	30,70
<b>D Pengadaan Listrik dan Gas</b>					
1 Ketenagalistrikan	91,30	92,28	92,78	92,42	92,70
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	8,70	7,72	7,22	7,58	7,30

Sumber: Direktori Perusahaan Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022

Selain potensi komoditas pertambangan di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memerlukan ketersediaan energi listrik guna mendukung aktivitas perekonomian. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan listrik yang terus meningkat setiap tahun. Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2022 adalah sebanyak 536.442, dengan pelanggan terbanyak berasal dari Kota Pangkalpinang sebanyak 180.412 pelanggan Daya listrik yang terpasang pad tahun 2022 sebanyak 1.069.108.950 KW. Terdapat 1.536.137.338 produksi listrik, 1.484.126.892 KWh terjual, 10.022.625 dipakai sendiri dan 97.770.938 KWh susut/hilang dalam pendistribusian.

**Tabel II.7 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2022**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	63 153	65 793	67 868	70 548	72 965
Belitung	60 915	64 345	67 483	71 085	73 768
Bangka Barat	60 934	63 576	65 726	68 744	71 568
Bangka Tengah	25 979	27 399	28 623	29 993	31 366
Bangka Selatan	50 124	52 475	54 805	57 414	59 985
Belitung Timur	38 301	40 132	42 348	44 473	46 378
Pangkalpinang	150 044	158 466	165 506	173 517	180 412
<b>Kep. Bangka Belitung</b>	<b>449 450</b>	<b>472 186</b>	<b>492 359</b>	<b>515 774</b>	<b>536 442</b>

*Sumber : Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2023*

#### 4. Perindustrian dan Perdagangan

Sementara itu, potensi pengembangan sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada potensi yang ada lebih banyak bergerak pada sub sektor berbasis industri agro seperti olahan hasil laut, lada, sirup jeruk kunci, tepung tapioka, gula aren, olahan nanas, teh gaharu, dan karet. Pada tahun 2021, terdapat 97 perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar 44 unit industri besar sedang ini merupakan industri makanan, 17 unit industri logam dasar, dan 15 unit industri barang galian bukan logam. Jumlah perusahaan industry besar dan sedang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Belitung yakni sebanyak 26 unit perusahaan. Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat total 21,557

industri mikro dan kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyerap 39,109 tenaga kerja. Sektor industri ini didominasi oleh kategori makanan dengan persentase sebesar 0,69%, Kayu, Barang dari kayu dan Gabus sebesar 0,09%, Minuman sebesar 0,06% dan Pakaian Jadi sebesar 0,05%.

**Tabel II.8 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Perusahaan Number of Establishments (unit)	Jumlah Tenaga Kerja Number of Workers Engaged (orang/ person)	Investasi InVestment (ribu rupiah/ thousand rupiahs)	Nilai Produksi Production Value (ribu rupiah /thousand rupiahs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bangka	3 060	6 586	-	-
Belitung	5 405	8 608	-	-
Bangka Barat	2 868	5 066	-	-
Bangka Tengah	1 045	1 703	-	-
Bangka Selatan	2 851	4 890	-	-
Belitung Timur	2 265	3 830	-	-
Pangkalpinang	4 063	8 426	-	-
<b>Kep. Bangka Belitung</b>	<b>21 557</b>	<b>39 109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2023

## 5. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi leading sektor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini telah diperkuat oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan ke 3 (tiga) sebagai arah kebijakan pembangunan berdasarkan potensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan telah mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah. Saat ini pembangunan kepariwisataan lebih difokuskan pada wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Namun ke depan, pembangunan akan memadukan melalui beragam potensi wisata dan mensinergikan dengan sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian, perikanan dan sektor lain sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini potensi wisata yang memiliki daya tarik cukup tinggi di Bangka Belitung adalah wisata bahari. Selain dikarenakan kondisi geografis dengan garis pantai sepanjang 1295,83 km dan karakteristik pasir pantai yang putih namun terdapat juga pemandangan indah lainnya seperti bebatuan granit, Sementara itu, meskipun Bangka Belitung sangat terkenal akan potensi wisata baharinya namun terdapat Juga beragam potensi lainnya sangat potensial untuk dikembangkan seperti keanekaragaman hayati flora (meranti, ramli, membalong, mandau, bulin, kregas, kapuk, Jelutung, dan lain-lain) serta fauna (rusa, beruk, monyet, trenggiling, kancil, musang, tarsius bancanius dan lain lain) yang merupakan potensi khas terdapat di Bangka Belitung.

Perkembangan pariwisata tak lepas dari bisnis jasa penginapan dan akomodasi. Pada umumnya, indikator kemajuan pariwisata tergambar dari jumlah akomodasi kamar hotel. Jumlah akomodasi hotel berbintang di Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 48 dengan jumlah kamar 3.029 pada tahun 2022. Apabila dibandingkan tahun 2021, terdapat pengurangan jumlah akomodasi sebanyak 3 unit, karena tutup sementara dan permanen pada tahun 2022. Akomodasi non bintang di Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 153 dengan jumlah kamar sebanyak 2.361. Apabila dibandingkan tahun 2021, terdapat penambahan jumlah akomodasi sebanyak 21 unit, karena sudah mulai beroperasi setelah tutup sementara pada tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat sebesar 33,70 persen dan 17,82 persen untuk non bintang. Adapun rata-rata lama menginap tamu asing selama tahun 2022 yaitu tiga sampai empat hari, sedangkan tamu domestik selama satu sampai dua hari.

**Tabel II.9 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Bulan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

Bulan Month	Hotel Klasifikasi Bintang Classified Hotel	Hotel Nonbintang Non-Classified Hotel
----------------	---	--

(1)	(2)	(3)
Januari/January	26,11	17,47
Februari/February	25,90	
Maret/March	34,12	
April/April	23,80	
Mei/May	39,32	
Juni/June	37,97	
Juli/July	38,77	
Agustus/August	32,65	
September/September	36,30	
Oktober/October	35,66	
November/November	35,24	17,91
Desember/December	36,99	18,81
Nama Provinsi	33,70	17,82

Sumber : Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2023

## 6. Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah yang dapat dikembangkan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

Potensi yang dapat dikembangkan yaitu kawasan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pengembangan yang luas di berbagai sektor, seperti pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Wilayah ini kaya akan keindahan alam, sumber daya mineral, lahan pertanian subur, sumber daya ikan melimpah, dan potensi energi surya dan angin. dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, investasi dalam infrastruktur, pelatihan, penelitian, dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan.

Kawasan Budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

### ➤ Kawasan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dilakukan melalui:

- 1) penataan batas kawasan peruntukan hutan produksi;
- 2) identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi);

- 
- 3) peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
  - 4) peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan;
  - 5) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - 6) pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan non kayu);
  - 7) Pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan peruntukan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.780 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) Ha;
- Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.639 (enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Ha;
- Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.083 (delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga ) Ha;
- Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 107.668 (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) Ha;
- Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 38.512 (tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas) Ha;
- dan Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 56.633 (lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Ha.

➤ **Kawasan Peruntukan Pertanian**

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui:

- 1) Penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional;
- 2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 3) Penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan

---

yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah;

- 4) Penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura;
- 6) Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala;
- 7) Penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- 8) Penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, keCil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan;
- 9) Penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar: kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar;
- 10) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 11) Penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- 12) Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.
- 13) Penetapan kawasan peruntukan pertanian, seluas 903.450 (Sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) hektar terdiri atas:
  - ❖ **kawasan** pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 hektar meliputi:
    - Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 hektar;

- 
- Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 hektar;
  - Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 hektar;
  - Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 hektar;
  - Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 hektar;
  - Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
  - Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 hektar.
- ❖ **kawasan** pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 hektar; meliputi:
- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 hektar;
  - Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 hektar;
  - Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 hektar;
  - Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 hektar;
  - Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 hektar;
  - Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 hektar. dan
  - Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 hektar.
- ❖ **kawasan** perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 hektar, meliputi: Perkebunan Besar meliputi :
- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 hektar;
  - Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 hektar;
  - Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 hektar;
  - Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 hektar;
  - Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 hektar
  - dan Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 hektar.
- ❖ Perkebunan rakyat meliputi :
- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 hektar;
  - Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 hektar;
  - Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 hektar;
  - Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 hektar;
  - Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 hektar;
  - dan Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 hektar.
- ❖ Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 hektar, meliputi:
- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 hektar; u
  - Kabupaten Bangka kurang lebih 318 hektar;
  - Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 hektar;
  - Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 hektar;
  - Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 hektar;
  - Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 hektar;
  - dan Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 hektar.

➤ **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui:

- 
- a) Penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan;
  - b) Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap;
  - c) Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
  - d) Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
  - e) Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan); Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap; dan
  - f) Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:

- Perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas :

1. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas:
  - PPN Sungailiat;
  - PPN Tanjung pandan.
2. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
  - PPI Bangka Kota;
  - PPI Permis; PPI Pulau Pongok;
  - PPI Batubetumpang;PPI Tanjung Sangkar;
  - PPI Ketapang;

- PPI Batu Dinding Belinyw .
  - PPI Kurau;
  - PPI Manggar;
  - PPI Muntok;
  - PPI Sadai;
  - PPI Selat Nasik;
  - PPI Pulau Seliu;
  - PPI Sungai Selan;
  - PPI Tanjung Binga;
  - PPI Toboali
  - PPI Selendang; dan
  - PPI Dendang.
3. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha;
  4. Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan
  5. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

#### ➤ **Kawasan Pertambangan**

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui:

- a. Memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi;
  - b. Peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis;
  - c. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi;
  - d. Identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
  - e. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
  - f. Memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang
- Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
  - Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

#### ➤ **Kawasan Industri**

Pengembangan kawasan Peruntukan industri dilakukan melalui :

- a. Menetapkan dan menyepakati kawasan kawasan Industri di Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan Industri;
- c. Membangun Instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri;
- d. Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energy baru terbarukan dan energi terbarukan; dan
- e. Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

---

Peruntukan kawasan peruntukan industri yang meliputi :

- a. kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- b. kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- c. kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- d. kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- e. kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung dan kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

➤ **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan melalui:

- a. Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh;
- b. Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah);
- c. Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada;
- d. Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
- e. Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penerapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
- b. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
- c. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
- d. Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
- e. Taman wisata laut;
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
- g. Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- h. Wisata budaya meliputi :
  - Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
  - Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
  - Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
  - Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
  - Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
  - Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.

- 
- wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

➤ **Kawasan peruntukan permukiman**

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara berikut:

- Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan;
- Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota;
- Penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan;
- Identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

➤ **Kawasan peruntukan lainnya**

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi :

- kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- dan kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

### **BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN**

#### **A. Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir ( menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga kelompok demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration).

Namun demikian dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Tabel III.1 Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut wilayah dan jenis kelamin.**

No	Wilayah	JENIS KELAMIN					
		L	LK %	P	PR %	TOTAL	TOTAL %
1	Kab. Bangka	170.809	21,9	162.155	21,9	332.964	21,9
2	Kab. Belitung	96.541	12,4	93.404	12,6	189.945	12,5
3	Kab. Bangka Selatan	108.377	13,9	101.967	13,7	210.344	13,8
4	Kab. Bangka Tengah	106.609	13,7	99.869	13,5	206.478	13,6
5	Kab. Bangka Barat	110.543	14,2	103.885	14,0	214.428	14,1
6	Kab. Belitung Timur	67.398	8,6	63.899	8,6	131.297	8,6
7	Kota Pangkalpinang	119.400	15,3	116.867	15,7	236.267	15,5
<b>8</b>	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>779.677</b>	<b>100</b>	<b>742.046</b>	<b>100</b>	<b>1.521.723</b>	<b>100</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

## B. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada

waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut. Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah

**Tabel III.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN	PEREMPUAN (%)	TOTAL
0-4Thn	57.838	7,4	54.329	7,3	112.167
5-9Thn	70.316	9,0	64.915	8,7	135.231
10-14Thn	75.613	9,7	70.887	9,6	146.500
15-19Thn	61.791	7,9	60.057	8,1	121.848
20-24Thn	64.084	8,2	61.919	8,3	126.003
25-29Thn	58.106	7,5	55.197	7,4	113.303
30-34Thn	58.790	7,5	57.319	7,7	116.109
35-39Thn	65.980	8,5	63.371	8,5	129.351
40-44Thn	68.518	8,8	62.460	8,4	130.978
45-49Thn	53.787	6,9	48.632	6,6	102.419
50-54Thn	44.371	5,7	40.109	5,4	84.480
55-59Thn	32.762	4,2	31.366	4,2	64.128
60-64Thn	26.293	3,4	26.098	3,5	52.391
65-69Thn	19.438	2,5	19.826	2,7	39.264
70-74Thn	12.022	1,5	12.433	1,7	24.455
>74Thn	9.968	1,3	13.128	1,8	23.096
<b>JUMLAH</b>	<b>779.677</b>	<b>100,0</b>	<b>742.046</b>	<b>100,0</b>	<b>1.521.723</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

### C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

#### 1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu wilayah pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per wilayah dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan di suatu wilayah sekaligus kualitas SDM.

**Tabel III.3 Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023**

Pendidikan Akhir	Laki-Laki	Laki-Laki (%)	Perempuan	Perempuan (%)	Total	Total (%)
Belum Sekolah	185.622	23,8	175.256	23,6	360.878	23,7
Tidak Tamat SD	101.153	13,0	93.046	12,5	194.199	12,8
Tamat SD	203.740	26,1	207.355	27,9	411.095	27,0
SLTP	99.497	12,8	91.233	12,3	190.730	12,5
SLTA	150.720	19,3	128.824	17,4	279.544	18,4
Diploma II	2.611	0,3	4.027	0,5	6.638	0,4
Diploman III	8.725	1,1	12.282	1,7	21.007	1,4
Strata I	25.745	3,3	28.904	3,9	54.649	3,6
Strata II	1.772	0,2	1.083	0,1	2.855	0,2
Strata III	92	0,0	36	0,0	128	0,0
<b>Total</b>	<b>779.677</b>	<b>100,0</b>	<b>742.046</b>	<b>100</b>	<b>1.521.723</b>	<b>100</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Dari tabel terlihat bahwa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 18,4% berpendidikan SLTA/ sederajat, 12,5% berpendidikan SLTP/ sederajat 27% berpendidikan SD/ sederajat. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi mulai dari Diploma I/II sampai Strata III hanya 3,8 %.

## 2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu wilayah pada waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk table, dari tabel ini akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Tabel III.4 Tabel distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023

WILAYAH	ISLAM	ISLAM (%)	KRISTEN	KRISTEN (%)	KHATOLIK	KHATOLIK (%)	HINDU	HINDU (%)	BUDHA	BUDHA (%)	KONGHU	KONGHU (%)	ALIRAN KEPERCAYAAN	KEPERCAYAAN (%)
Kab. Bangka	289.119	21,02	7.902	24,65	3.579	18,31	40	3,15	23.222	37,24	8.264	27,63	428	96,40
Kab. Belitung	175.013	12,72	3.376	10,53	1.267	6,48	804	63,41	9.288	14,89	186	0,62	6	1,35
Kab. Bangka Selatan	203.925	14,82	1.352	4,22	876	4,48	277	21,85	1.458	2,34	2.456	8,21	0	0,00
Kab. Bangka Tengah	182.847	13,29	5.232	16,32	5.237	26,78	50	3,94	5.884	9,44	7.227	24,16	0	0,00
Kab. Bangka Barat	198.543	14,43	3.062	9,55	1.083	5,54	32	2,52	7.962	12,77	3.743	12,51	3	0,68
Kab. Belitung Timur	125.980	9,16	1.736	5,41	414	2,12	2	0,16	2.999	4,81	165	0,55	1	0,23
Kota Pangkalpinang	200.274	14,56	9.403	29,33	7.096	36,29	63	4,97	11.550	18,52	7.869	26,31	6	1,35
<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>1.375.701</b>	<b>100</b>	<b>32.063</b>	<b>100</b>	<b>19.552</b>	<b>100</b>	<b>1.268</b>	<b>100</b>	<b>62.363</b>	<b>100</b>	<b>29.910</b>	<b>100</b>	<b>444</b>	<b>100</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Tabel III.5 distribusi penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023

AGAMA	Laki-Laki	Laki-Laki (%)	Perempuan	Perempuan (%)	Total	Total (%)
Islam	706.314	90,6	669.387	90,2	1.375.701	90,4
Katholik	9.589	1,2	9.963	1,3	19.552	1,3
Kristen	9.288	2,2	32.063	2,2	32.063	2,1
Hindu	667	0,1	601	0,1	1.268	0,1
Budha	31.438	4,0	30.925	4,2	62.363	4,1
Konghucu	15.239	2,0	14.671	2,0	29.910	2,0
Aliran Kepercayaan	444	0,1	422	0,1	866	0,1
<b>Total</b>	<b>779.677</b>	<b>100,0</b>	<b>742.046</b>	<b>100,0</b>	<b>1.521.723</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 90,4 % penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Budha yakni 4,1 % dan hanya sebagian kecil beragama Kristen, Katholik, Konghucu serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### 3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecatatan (cacat fisik, cacat netra, cacat rungu, cacat fisik dan mental, dan cacat lainnya) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan *kategori khusus*

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel tunggal menurut kabupaten.

**Tabel III.6 Penduduk penyandang cacat menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023**

WILAYAH	PENYANDANG CACAT						Σ CACAT
	CACAT FISIK	CACAT NETRA	CACAT RUNGU	CACAT MENTAL	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT LAINNYA	
Kab. Bangka	73	118	54	713	33	84	1.075
Kab. Belitung	104	103	17	250	44	33	551
Kab. Bangka Selatan	28	41	16	91	11	10	197
Kab. Bangka Tengah	72	70	17	409	23	17	608
Kab. Bangka Barat	85	101	53	293	47	90	669
Kab. Belitung	69	67	14	329	151	38	668
Kota Pangkalpinang	67	90	15	332	20	52	576
Prov. Kep. Bangka Belitung	<b>498</b>	<b>590</b>	<b>186</b>	<b>2.417</b>	<b>329</b>	<b>324</b>	<b>4.344</b>

Sumber : Data SIAK Sem II Tahun 2023 Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah

**Tabel III.7 Penduduk penyandang cacat menurut Jenis Kelamin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023**

PENYANDANG CACAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
CACAT FISIK	298	200	498
CACAT NETRA	309	281	590
CACAT RUNGU	101	85	186
CACAT MENTAL	1.590	827	2.417
CACAT FISIK DAN MENTAL	184	145	329
CACAT LAINNYA	180	144	324
<b>TOTAL</b>	<b>2.662</b>	<b>1.682</b>	<b>4.344</b>

Sumber : Data SIAK Sem II Tahun 2023 Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah

### 4) Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu disajikan per wilayah dalam bentuk Tabel. Status kawin meliputi belum kawin, kawin dan cerai

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana/pembangunan keluarga.

Tabel III.8 distribusi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut status kawin dan jenis kelamin, Semester II Tahun 2023

STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L+P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Belum Kawin	393.052	50,4	317.599	42,8	710.651	46,7
Kawin	356.007	45,7	356.819	48,1	712.826	46,8
Cerai Hidup	14.076	1,8	16.688	2,2	30.764	2,0
Cerai Mati	16.542	2,1	50.940	6,9	67.482	4,4
<b>Jumlah</b>	<b>779.677</b>	<b>100,0</b>	<b>742.046</b>	<b>100,0</b>	<b>1.521.723</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Tabel III.9 distribusi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut status kawin dan kabupaten, Semester II Tahun 2023

WILAYAH	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kab. Bangka	159.901	22,5	151.016	21,2	6.412	20,8	15.635	23,2	332.964	21,9
Kab. Belitung	82.362	11,6	92.808	13,0	5.881	19,1	8.894	13,2	189.945	12,5
Kab. Bangka Selatan	95.145	13,4	104.558	14,7	2.433	7,9	8.208	12,2	210.344	13,8
Kab. Bangka Tengah	102.708	14,5	92.002	12,9	2.910	9,5	8.858	13,1	206.478	13,6
Kab. Bangka Barat	100.962	14,2	100.482	14,1	3.717	12,1	9.267	13,7	214.428	14,1
Kab. Belitung Timur	55.545	7,8	65.178	9,1	4.018	13,1	6.556	9,7	131.297	8,6
Kota Pangkalpinang	114.028	16,0	106.782	15,0	5.393	17,5	10.064	14,9	236.267	15,5
<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>710.651</b>	<b>100</b>	<b>712.826</b>	<b>100</b>	<b>30.764</b>	<b>100</b>	<b>67.482</b>	<b>100</b>	<b>1.521.723</b>	<b>100</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Tabel di atas menyajikan komposisi penduduk menurut status perkawinan, dalam komposisi di atas terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki belum kawin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Disamping itu terlihat pula persentase penduduk yang berstatus cerai penduduk laki-laki lebih rendah daripada perempuan.

a) Rata-Rata Umur Kawin Pertama (SMAM)

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat, para demografer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM).

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan

---

agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

*Tabel III.10 Rata-rata Usia Kawin Pertama Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023*

<b>WILAYAH</b>	<b>RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA LAKI-LAKI</b>	<b>RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN</b>
Kab. Bangka	29	25
Kab. Belitung	28	24
Kab. Bangka Selatan	28	24
Kab. Bangka Tengah	29	25
Kab. Bangka Barat	28	23
Kab. Belitung Timur	27	23
Kota Pangkalpinang	29	25
<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>28</b>	<b>24</b>

*Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata umur pertama kali kawin penduduk perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Semester II Tahun 2023 adalah 28 tahun untuk laki-lakinya dan untuk perempuan adalah 24 tahun

## BAB IV

### GAMBARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BANGKA BELITUNG

#### A. IPM, IPG DAN IDG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jika dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan melalui Rasio jenis atau Sex Ratio di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester II tahun 2023 sebesar 105,1 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki

**Tabel IV.1 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023**

No	Wilayah	JENIS KELAMIN					SEX RATIO
		L	PERSEN LK	P	PERSEN PR	TOT	
1	Kab. Bangka	170.809	22,4	162.155	21,9	332.964	105,3
2	Kab. Belitung	96.541	12,6	93.404	12,6	189.945	103,4
3	Kab. Bangka Selatan	108.377	14,2	101.967	13,7	210.344	106,3
4	Kab. Bangka Tengah	106.609	14,0	99.869	13,5	206.478	106,7
5	Kab. Bangka Barat	110.543	14,5	103.885	14,0	214.428	106,4
6	Kab. Belitung Timur	67.398	8,8	63.899	8,6	131.297	105,5
7	Kota Pangkalpinang	119.400	15,6	116.867	15,7	236.267	102,2
<b>8</b>	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>779.677</b>	<b>102</b>	<b>742.046</b>	<b>100</b>	<b>1.521.723</b>	<b>105,1</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kuantitas penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki. Jumlah perempuan yang sedikit dan boleh dikatakan berimbang dengan laki-laki tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya bagaimana kualitas perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seiring dengan perjalanan waktu kaum perempuan di Negeri Serumpun Sebalai sudah bisa dikatakan pada posisi lebih baik dibanding dengan kondisi mereka pada beberapa dekade yang lampau. Hampir tidak ada lagi terdengar kasus-kasus yang menyatakan dengan terang-terangan yang bertendensi merendahkan kehadiran kaum perempuan dikarenakan perbedaan jenis kelamin. Sebab bagaimanapun kemajuan ilmu pengetahuan, pemahaman agama yang semakin baik, keterbukaan media informasi dan kemajuan dunia pendidikan menjadi sangat determinan serta berimplikasi bagi perubahan mindset (pola pikir) masyarakat pada semua level dan kelompok untuk dapat beradaptasi, menyesuaikan diri secara lebih modern dan beradab.

Namun itu tidak bisa dianggap sebagai pendapat umum yang menafikan peristiwa-peristiwa sosial berdimensi bias gender pada level tatanan kebijakan maupun praktik lapangan. Sesungguhnya bila kita perhatikan dengan seksama bahwa masih ada dan terlihat fakta ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender dengan sangat jelas. Perempuan masih

dianggap memiliki peran dan fungsi kurang beruntung, masih dipandang sebagai kelompok kerja yang identik dengan ranah teritorial dapur sumur dan kasur. Meskipun mereka bekerja di luar itu namun seringkali menempati posisi yang kurang strategis.

Kondisi yang tidak responsif dan belum ideal ini menempatkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) maupun IPG (Indeks Pembangunan Gender) bahkan pada capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum membanggakan yaitu 74,09 pada tahun 2023 (*sumber BPS RI*). Sehingga perlu upaya dan kebijakan dari seluruh komponen dan stake holders agar pembangunan dapat dirasakan secara merata dan adil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu sendiri terdiri dari 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Sementara itu perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia antara laki-laki dan perempuan di Bangka Belitung di sajikan pada table berikut

**Tabel IV.2 Indeks Pembangunan Manusia (Perempuan) Tahun 2019 s.d 2023**

Wilayah Babel	IPM Perempuan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	67.23	67.35	67.69	68.39	69
Bangka	67.90	67.90	67.95	68.67	69,5
Belitung	67.83	67.84	67.90	68.72	69,44
Bangka Barat	66.29	66.30	66.80	67.35	67,69
Bangka Tengah	67.88	68.23	68.54	69.29	69,66
Bangka Selatan	59.77	60.05	60.50	61.41	61,93
Belitung Timur	64.99	65.21	65.72	66.59	67,29
Kota Pangkalpinang	76.19	76.50	76.85	77.52	78,15

*Sumber : BPS, 2024*

Sementara IPM laki-laki di Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada table berikut

**Tabel IV.3 Indeks Pembangunan Manusia (Laki-laki) Tahun 2019 s.d 2023**

Wilayah Babel	IPM Laki-Laki				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	75.54	75.74	75.96	76.37	76,8
Bangka	76.73	76.74	76.90	77.30	77,88
Belitung	76.55	76.85	76.91	77.35	77,84
Bangka Barat	73.60	73.64	74.19	74.59	74,91
Bangka Tengah	74.55	74.58	75.04	75.50	75,79
Bangka Selatan	71.27	71.65	71.76	72.30	73,02
Belitung Timur	75.42	75.50	75.92	76.58	77,08
Kota Pangkalpinang	82.02	82.12	82.41	83.04	83,89

*Sumber : BPS, 2024*

Jika dilihat perbandingan IPM laki-laki dan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari data di atas di simpulkan bahwa IPM laki-laki ternyata lebih tinggi dari perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) itu sendiri adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup

partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel berikut.

**Tabel IV.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 s.d 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Kabupaten/Kota	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Bangka	86,92	87,17	88,14	88,24	88,49	88,48	88,36	88,84	89,24
2.	Belitung	87,19	87,98	87,99	88,62	88,61	88,28	88,29	88,84	89,21
3.	Bangka Barat	88,56	88,71	89,41	88,92	90,07	90,03	90,04	90,29	90,36
4.	Bangka Tengah	90,60	90,61	90,83	91,04	91,05	91,49	91,34	91,77	91,91
5.	Bangka Selatan	82,52	82,83	83,48	83,54	83,86	83,81	84,31	84,94	84,81
6.	Belitung Timur	85,37	86,10	86,04	67,36	86,17	86,37	86,56	86,95	87,3
7.	Pangkal Pinang	92,47	93,09	92,08	93,94	92,89	93,16	93,25	93,35	93,16
	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>87,74</b>	<b>88,37</b>	<b>88,93</b>	<b>89,15</b>	<b>89,00</b>	<b>88,92</b>	<b>89,11</b>	<b>89,55</b>	<b>89,84</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Secara global Indeks pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari data yang disajikan naik sekitar 0,39%. hal ini juga di ikuti oleh semua kabupaten/kota di provinsi kepulauan Bangka belitung. Namun capaian tersebut masih berada dibawah capaian nasional yaitu 91.85 pada tahun 2023 (BPS, 2024).

Perempuan adalah kelompok masyarakat yang sangat menentukan nasib bangsa. Sejak Provinsi yang bernuansa budaya Melayu Islami ini disahkan, anggota dewan atau para legislatif bisa kita catat dan lihat masih sangat sedikit anggota dewan perwakilan daerah (DPRD) dari kaum perempuan di dewan Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota. Dari umpamanya jatah kursi 45 (empat puluh lima) orang untuk kursi anggota legislatif tingkat provinsi, perempuannya di periode 2014 s.d. 2019 hanya ada (empat) orang saja. Bayangkan betapa termarginalnya mereka di rumah yang merupakan representasi suara rakyat ini. Belum lagi pada saat harus bersuara keras menyuarakan aspirasi masyarakat tentu saja akan sangat lemah posisi tawarnya.

---

Perbedaan mencolok juga mewarnai pada bidang kepemimpinan publik dan eksekutif. Kepala daerah masih menjadi domain kaum laki-laki mulai dari Ketua RT/RW, Lurah/Kepala desa, Camat, Bupati/ Walikota dan juga Gubernur. Figur kepemimpinan perempuan di ranah ini sepertinya belum pernah teruji disamping kesempatannya masih terbilang minim. Sebagai ketua organisasi resmi pemerintahan maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya sepertinya belum proporsional. Perempuan belum punya nyali yang kuat, sehingga kaum laki-laki masih terlalu dominan bila dibandingkan dengan lawan jenisnya. Perempuan kita sepertinya lebih mengambil langkah mundur ketimbang harus bertandem dengan kaum pria.

Pada sektor-sektor pekerjaan non formal pemerintahan, seperti di sektor-sektor industri dengan beragam klasifikasinya, perkebunan, pertanian, perdagangan, perikanan industri, bidang layanan jasa dan lain-lain sekali lagi data masih berpihak kepada kalangan laki-laki. Pada lapangan-lapangan yang memerlukan pekerjaan fisik dan otot yang lebih keras maka kaum laki-laki sangat dibutuhkan tenaganya, sebab alasannya sudah bisa ditebak bahwa perusahaanpun tentu mencari profit (untung), benefit dan tidak mau rugi (lose). Maka dalam tujuan itu sebagai konsekuensinya jumlah pekerja laki-laki relatif menjadi prioritas. Hampir tidak ada peluang bagi kaum perempuan dengan segala image yang melekat pada dirinya untuk dapat bersaing dan menyamakan statusnya dengan kaum laki-laki dalam fakta maupun data.

Sementara Indeks pemberdayaan gender (IDG) adalah indikator yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisahkan gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Berikut gambaran IDG di Provinsi Bangka Belitung pada tabel dibawah ini;

**Tabel IV.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2015 s.d 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	Kabupaten/Kota	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Bangka	62,01	61,32	47,84	62,20	65,18	65,24	62,34	61,67	61,19
2.	Belitung	40,16	52,00	52,72	48,48	53,82	53,11	53,02	53,42	53,47
3.	Bangka Barat	55,57	59,37	59,98	49,88	64,82	64,48	61,77	64,62	64,15
4.	Bangka Tengah	54,29	50,71	43,30	56,39	57,31	57,50	56,81	54,67	63,29
5.	Bangka Selatan	37,13	37,93	48,94	48,46	49,29	49,93	48,65	50,14	49,45
6.	Belitung Timur	63,33	63,04	55,54	68,21	56,74	56,81	55,10	55,64	54,92
7.	Pangkal Pinang	55,44	55,22	43,35	57,17	61,88	61,84	61,19	61,60	65,1
	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>56,12</b>	<b>56,29</b>	<b>54,17</b>	<b>52,57</b>	<b>52,96</b>	<b>53,03</b>	<b>57,49</b>	<b>58,20</b>	58,22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) grafik dan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional, IDG Bangka Belitung masih jauh dibawah capaian nasional 76,90 pada tahun 2023 (BPS, 2024). Dari angka tabel diatas menunjukkan IDG di Bangka Belitung memang meningkat tetapi tentunya tetap akan menjadi pekerjaan rumah untuk kedepannya karena tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kalah dibandingkan provinsi lain.

## B. PARTISIPASI PEREMPUAN

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Penerapan kuota 30% tetap tidak membuat representasi perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami kenaikan dan partai politik juga mengikuti aturan kuota tersebut. Isu tentang representasi perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi. Meskipun belum

mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di politik. Partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan bagaimana budaya, proses seleksi partai politik, media, jaringan organisasi yang mempengaruhi representasi perempuan di politik. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan, berikut gambaran keterwakilan perempuan di lembaga politik.

**Tabel IV.6 Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif periode tahun 2020-2023**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	91.11	90,48	8.89	9,52
Bangka	85.71	85,29	14.29	14,71
Belitung	92.00	92	8.00	8
Bangka Barat	84.00	84	16.00	16
Bangka Tengah	88.00	80	12.00	20
Bangka Selatan	92.00	92	8.00	8
Belitung Timur	92.00	92	8.00	8
Pangkalpinang	90.00	86,67	10.00	13,33

Sumber : DP3ACSKB (data Olahan), 2023

Dari data pada tabel di atas jika dilihat dari jumlah perempuan yang duduk di legeslatif memang terjadi peningkatan. Pada pemilihan umum 2009 keterwakilan perempuan yang duduk di perlemen berjumlah 18 orang atau sekitar 8,6% dari total anggota parlemen di Bangka Belitung dan pada pemilihan umum tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 24 orang total keseluruhan perempuan yang duduk di parlemen atau sekitar 11,94%. Berikut bisa dilihat perbandingan persentase perempuan di legeslatif dengan laki-laki sebagai legeslatif di Bangka Belitung

**Tabel IV.7 Persentase Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin (Persen)**

No	Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Pemilu 2009					Pemilu 2014					Pemilu 2019				
		L	%	P	%	L+ P	L	%	P	%	L+ P	L	%	P	%	L+ P
1	Bangka	26	86,67	4	13,33	30	30	85,71	5	14,29	35	29	82,86	6	17,14	35
2	Belitung	23	92,00	2	8,00	25	25	100,00	0	0,00	25	23	92,00	2	8,00	25
3	Bangka Barat	23	92,00	2	8,00	25	23	92,00	2	8,00	25	21	84,00	4	16,00	25
4	Bangka Tengah	22	88,00	3	12,00	25	22	88,00	3	12,00	25	22	88,00	3	12,00	25
5	Bangka Selatan	24	96,00	1	4,00	25	23	92,00	2	8,00	25	23	92,00	2	8,00	25
6	Belitung Timur	20	100,00	0	0,00	20	20	80,00	5	20,00	25	23	92,00	2	8,00	25
7	Pangkalpinang	24	96,00	1	4,00	25	23	92,00	2	8,00	25	27	90,00	3	10,00	30
8	Kepulauan Bangka Belitung	40	88,89	5	11,11	45	41	91,11	4	8,89	45	43	95,56	2	4,44	45

---

Sumber : BPS, 2024

Dari data di atas bisa dilihat Sampai dengan tahun 2023 belum ada persentase yang duduk di parlemen besarnya sebesar 30 persen. Kabupaten/kota yang paling banyak keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen adalah kabupaten Bangka Barat dengan persentase sebesar 16% atau sekitar 4 orang. Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan yang dilihat dari masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah budaya patriarki, dimana dalam budaya ini perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam dunia perpolitikan di tanah air. Faktor kedua ialah masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, seperti dalam bidang ekonomi. Kebanyakan perempuan belum terlalu memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang memadai, hal itu yang kemudian menjadikan kualitas perempuan masih rendah yang tentunya akan sangat berdampak pada tingkat partisipasi perempuan di dunia politik.

### C. GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiap warga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab I Pasal 3 menerangkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi. Aturan-aturan tersebut di atas mengamanatkan bahwa semua lapisan masyarakat baik pemerintah, pihak swasta atau masyarakat wajib mendukung kegiatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan harus diberikan pada seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan karena pembangunan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia berkualitas tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kader-kader bangsa. Ibu yang berkualitas diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas. Permasalahan dari rendahnya angka pendidikan berakibat pada kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain. Permasalahan pendidikan bukan hanya dilatar belakangi oleh masing-masing pribadi, namun penyediaan sarana dan prasarana ikut andil dalam keberhasilan bidang pendidikan.

Pendidikan formal menjadi acuan dasar dalam peningkatan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai sama pentingnya dengan peranserta dan partisipasi sekolah masyarakat. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dapat di lihat dari table berikut :

### 1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menyajikan persentase/proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada suatu tahun tertentu.

Indikator ini menggambarkan mutu dan kemampuan sumberdaya manusia di suatu daerah dalam menyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator maka semakin tinggi pula mutu sumberdaya manusia di suatu daerah. Indikator AMH dapat digunakan untuk :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih banyak ditemukan penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf sehingga mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

**Tabel. IV.8 Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis**

NO	WILAYAH	PENDUDUK LAKI-LAKI MELEK HURUF	PENDUDUK PEREMPUAN MELEK HURUF	PENDUDUK MELEK HURUF
1	Kab. Bangka	99,07	96,44	97,81
2	Kab. Belitung	99,69	98,39	99,06
3	Kab. Bangka Selatan	98,91	95,71	97,37
4	Kab. Bangka Tengah	98,87	95,69	97,35
5	Kab. Bangka Barat	98,33	98,17	98,26
6	Kab. Belitung Timur	99,48	97,65	98,6
7	Kota Pangkalpinang	99,21	97,95	98,58
	Prov. Kep. Bangka Belitung	99,05	97,08	98,10

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Dari data tersebut diketahui bahwa 98,10 % penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis dan 1,90% penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Buta Huruf. Sedangkan Angka Melek Huruf Penduduk Laki-Laki umur 15 tahun ke atas sebesar 99,05% dan 0,95% adalah Buta Huruf. Angka Melek Huruf penduduk perempuan adalah 97,08% dan 2,92% adalah Buta Huruf. Angka Melek Huruf tertinggi adalah di wilayah Kabupaten Belitung dengan AMH sebesar 99,06% dan 0,94% adalah Buta Huruf.

## 2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.

**Tabel IV.9 Angka Partisipasi Kasar**

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023
SD/MI	107,26	106,09
SMP/MTs	87,85	88,51
SMA/SMK/MA	87,85	88,28

Sumber : BPS, 2024

## 3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

**Tabel IV.10 Angka Partisipasi Murni**

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	2022	2023
SD/MI	98,01	98,11
SMP/MTs	74,68	77
SMA/SMK/MA	59,65	60,72

Sumber : BPS, 2024

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat adalah 98,01 persen. Angka Partisipasi Murni penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SLTP/Sederajat sebesar 77 persen ditahun 2023

sementara partisipasi SLTA/Sederaja yaitu sebesar 60,72 persent. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

#### 4) Angka Putus Sekolah

**Tabel IV.11** Angka Putus Sekolah murid menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.

Jenjang Pendidikan	□ Murid	Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	162.556	287	1,77
SLTP	61.801	47	0,76
SLTA	54.887	105	1,91

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022, diolah

- a) Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar.
- b) Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.
- c) Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.
- d) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.

#### 5) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka

Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita. Rata-rata lama sekolah di Bangka Belitung sendiri dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 12 Rata-rata lama sekolah Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Wilayah Babel	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	7.67	7.82	7.87	8,11
Bangka	7.99	8.00	8.02	8,16
Belitung	8.07	8.08	8.36	8,65
Bangka Barat	7.19	7.39	7.41	7,42
Bangka Tengah	6.90	6.91	6.93	6,94
Bangka Selatan	6.20	6.46	6.64	6,72
Belitung Timur	8.05	8.29	8.49	8,79
Kota Pangkalpinang	9.61	9.82	9.93	10,08

Sumber : BPS, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan rata rata lama sekolah di provin Bangka Belitung dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,44 %. Sementara jika di dibandingkan dengan Rata-rata lama sekolah laki-laki di Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.13 Rata-rata lama sekolah Laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Wilayah Babel	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	8.41	8.42	8.43	8,45
Bangka	8.70	8.71	8.72	8,74
Belitung	8.94	8.95	8.96	9,08
Bangka Barat	7.81	8.04	8.06	8,07
Bangka Tengah	7.62	7.63	7.65	7,66
Bangka Selatan	7.19	7.20	7.21	7,23
Belitung Timur	8.46	8.71	8.82	8,98
Kota Pangkalpinang	10.37	10.46	10.60	10,84

Sumber : BPS, 2024

Sama hal dengan perempuan laki-laki pun jika dilihat dari tabel di atas untuk angka rata-rata lama sekolah di Bangka Belitung dari tahun 2020 ke 2023 juga mengalami peningkatan tetapi tidak sebesar perempuan yaitu sebesar 0,04%. Dan jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 masih tinggi laki-laki dengan selisih sebesar 0,36%.

## D. GENDER BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

### 1. EKONOMI

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Untuk Bangka Belitung sendiri Pengeluaran per kapita dapat dilihat melalui tabel di bawah ini yang di sajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel IV.14 Pengeluaran per kapita Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019 s.d 2023**

Wilayah Babel	Pengeluaran Perkapita Perempuan (Ribu/Rupiah/Orang/Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	9085	8987	9012	9378	9527
Bangka	8223	8188	8195	8628	8765
Belitung	8968	8924	8932	9235	9411
Bangka Barat	9175	9134	9169	9546	9768
Bangka Tengah	10438	10287	10322	10689	10841
Bangka Selatan	6283	6214	6222	6513	6681
Belitung Timur	7026	6978	6994	7317	7426
Kota Pangkalpinang	14344	14130	14162	14743	15102

*mb sumber: BPS, 2024*

Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita untuk laki-laki adalah masih sangat bias, pengeluaran per kapita untuk laki-laki dapat dilihat pada table dibawah ini

**Tabel IV.15 Pengeluaran per kapita laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019 s.d 2023**

Wilayah Babel	Pengeluaran Perkapita Laki-laki (Ribu/Rupiah/Orang/Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	19364	19075	19096	19736	20054
Bangka	18469	18362	18375	18961	19244
Belitung	20345	20031	20045	20771	21110
Bangka Barat	18328	18253	18290	18934	19249
Bangka Tengah	19106	18758	18797	19453	19700
Bangka Selatan	18633	18382	18397	19089	19649
Belitung Timur	18391	18182	18217	18949	19129
Kota Pangkalpinang	22169	21846	21916	22724	23152

*Sumber: BPS, 2024*

---

Dari kedua tabel di atas perbandingan tingkat pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan masih cukup jauh dariimbang terbukti pada tahun 2023 di Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk laki-laki pengeluaran perkapita sebesar 20054 dan untuk perempuan 9527 (jika di hitung dalam Ribu/Rupiah/Orang/Tahun). Jadi jika diuraikan pendapatan laki-laki sebesar Rp. 20.054.000/ orang/ tahun, sedangkan perempuan Rp. 9.527.000/ orang /tahun. Perbandingan selisih pengeluaran perempuan lebih dari setengahnya pengeluaran perkapita laki-laki, dengan besaran selisih Rp.10.527.000 /orang/ tahun. Walaupun masih jauh dibawah laki-laki tetapi jika dilihat dari tahun 2020 ke tahun 2023 pengeluaran perkapita untuk perempuan di Bangka Belitung bertambah.

Jika kita analisis pada faktor pengeluaran perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan dimana semakin tinggi pengeluaran perkapita kaum perempuan maka semakin tinggi pula tingkat serapan tenaga kerja perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi. Meningkatnya pengeluaran perkapita pada perempuan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan secara ekonomi yang dirasakan oleh kaum perempuan. Sehingga tingginya kesejahteraan secara ekonomi yang dirasakan oleh kaum perempuan akan memberikan akses yang lebih besar pada pendidikan, dimana semakin luasnya akses kaum perempuan pada pendidikan, maka akan meningkatkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan yang akan diikuti dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas tinggi. Sehingga meningkatnya pengeluaran perkapita ada kaum perempuan akan meningkatkan akses dalam kesempatan dalam memasuki pasar kerja sektor formal. Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari pengeluaran perkapita perempuan di Provinsi Bangka Belitung masih sangat rendah sehingga jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan perempuan di Bangka Belitung masih jauh di bandingkan dengan laki-laki.

### **1.1. TENAGA KERJA**

Tenaga Kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Dari hasil pengolahan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui bahwa jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 1.521.723 jiwa dan jumlah penduduk usia produktif

/ jumlah tenaga kerja sebesar 1.041.010 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui proporsi tenaga kerja penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar **68,4%**.

**Tabel IV.16** Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2023

NO	WILAYAH	USIA PRODUKTIF	JUMLAH PENDUDUK	PERSEN TENAGA KERJA
1	BANGKA	226.317	332.964	68,0
2	BELITUNG	131.800	189.945	69,4
3	BANGKA SELATAN	146.113	210.344	69,5
4	BANGKA TENGAH	140.791	206.478	68,2
5	BANGKA BARAT	146.860	214.428	68,5
6	BELITUNG TIMUR	91.162	131.297	69,4
7	PANGKALPINANG	157.967	236.267	66,9
<b>8</b>	<b>PROV. KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>1.041.010</b>	<b>1.521.723</b>	<b>68,4</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula

**a) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)**

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerja (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Data angkatan kerja ini dari Data SIAK Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah dan proporsi angkatan kerja ini dapat disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel. IV.17** Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2021

WILAYAH	ANGKATAN KERJA			TENAGA KERJA
	PENCARI KERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	
Kab. Bangka	23.466	158.907	182.373	222.430
Kab. Belitung	7.418	97.913	105.331	127.824
Kab. Bangka Selatan	9.640	106.944	116.584	141.285
Kab. Bangka Tengah	5.774	101.214	106.988	137.310
Kab. Bangka Barat	5.801	105.305	111.106	142.271
Kab. Belitung Timur	5.329	67.809	73.138	89.385
Kota Pangkalpinang	9.415	111.829	121.244	152.902
<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>66.843</b>	<b>749.921</b>	<b>816.764</b>	<b>1.013.407</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2021, diolah

Data Proporsi angkatan kerja ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja yaitu usia 15-64 Tahun yang bekerja tidak termasuk pelajar/mahasiswa dan pensiunan, sementara untuk yang bekerja diperoleh dari usia 15-64 tahun yang aktif bekerja. Sedangkan untuk pencari kerja yaitu usia 15-64 tahun yang sedang mencari/belum bekerja.

- b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK). TPAK juga dapat diartikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. Berikut capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Bangka Belitung

**Tabel. IV.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021 s.d 2023**

Kabupaten/kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
	2021	2022	2023
Babel	65,88	67,38	68,34
Bangka	62,68	68,81	67,46
Belitung	66,28	65,25	68,09
Bangka Barat	65,98	70,23	70,22
Bangka Tengah	66,24	66,47	70,09
Bangka Selatan	68,96	66,71	66,93
Belitung Timur	69,23	67,36	70,48
Pangkalpinang	65,16	65,78	66,55

Sumber; BPS 2024

- c) Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

**Tabel IV.19 Angka Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semester II Tahun 2021**

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA			BUKAN ANGKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
	PENCARI KERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA			
15-19 Thn	26.057	802	26.859	89.867	116.726	23,01
20-24 Thn	16.008	25.215	41.223	78.597	119.820	34,40
25-29 Thn	11.856	73.328	85.184	24.019	109.203	78,01
30-34 Thn	5.680	111.039	116.719	2.604	119.323	97,82
35-39 Thn	2.463	124.486	126.949	89	127.038	99,93
40-44 Thn	1.525	124.275	125.800	14	125.814	99,99
45-49 Thn	1.031	98.286	99.317	14	99.331	99,99
50-54 Thn	802	80.289	81.091	20	81.111	99,98
55-59- Thn	607	61.501	62.108	139	62.247	99,78
60-64 Thn	814	50.700	51.514	1.280	52.794	97,58
<b>Jumlah</b>	<b>66.843</b>	<b>749.921</b>	<b>816.764</b>	<b>196.643</b>	<b>1.013.407</b>	<b>80,60</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2021, diolah

Dari hasil perhitungan Angka Partisipasi Angkatan Kerja di atas diperoleh APAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 80,60%, artinya 80,60% penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

### 1.2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja); atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, *trend* indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

**Tabel. IV.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA			
	2020	2021	2022	2023
BANGKA	5.42	5.97	5.39	5,03
BELITUNG	4.82	3.51	4.30	4,14
BANGKA SELATAN	5.42	5.29	5.09	4,77
BANGKA TENGAH	5.59	4.95	3.99	3,88
BANGKA BARAT	4.12	3.83	4.86	4,84
BELITUNG TIMUR	3.93	3.78	2.50	2,41
PANGKALPINANG	6.93	6.81	5.90	5,76
PROV. KEP BANGKA BELITUNG	5.25	5.03	4.77	4,56

*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah*  
 Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran tersebut, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Pada tabel terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 4,56%, artinya 4,56% penduduk usia produktif berusaha terlibat di dalam di dunia pekerjaan.

### 1.3. Pekerjaan Favorit perempuan di Bangka Belitung

Dari data yang didapat ternyata ada beberapa pekerjaan yang banyak di sukai oleh kaum perempuan di Bangka Belitung, berikut disajikan pekerjaan yang banyak di minati perempuan di Bangka Belitung ;

**Tabel IV.21 Pekerjaan Perempuan yang paling banyak diminati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NAMA_KAB	PEGA WAI_ NEGE RI_SI PIL	T N I	PO LIS I	PE RD AG AN GA N	PETA NI_PE KEBU N	KARY AWA N_S WAS TA	KA RY AW AN _B UM N	KAR YA WA N_B UM D	KAR YAW AN_ HON ORE R	BUR UH_ HARI AN_L EPAS	BURU H_TA NI_PE RKEB UNAN	BURU H_NEL AYAN_ PERIK ANAN	BUR UH_ PET ERN AKA N	PEMB ANTU_ RUMA H_TAN GGA	TU KA NG _JA HIT	PE NA TA _RI AS	PE NAT A_R AM BUT	PERA NCAN G_BU SANA	WAR TAWA N	JU RU _M AS AK	DO SE N	GU RU	DO KT ER	BID AN	PE RA WA T	PE DA GA NG	PERA NGKA T_DE SA	WIRA SWA STA
KAB. BANGKA	2.949	3	33	96	2.805	3.578	105	29	1.709	634	114	1	1	52	19	8	12	0	3	2	66	743	70	140	165	128	61	1.843
KAB. BELITUNG	2.160	3	23	179	254	2.752	65	21	771	471	31	2	2	51	17	4	9	0	1	7	10	252	38	44	33	101	85	1.063
KAB. BANGKA SELATAN	1.419	0	8	67	2.815	323	13	2	1.506	171	114	1	1	18	4	4	0	0	0	0	3	302	9	27	14	211	120	1.118
KAB. BANGKA TENGAH	1.470	0	17	54	1.027	1.322	25	6	757	697	90	2	0	8	1	2	1	1	0	0	12	416	23	77	59	100	13	1.387
KAB. BANGKA BARAT	1.504	0	12	95	2.165	793	38	8	931	932	274	2	1	42	20	3	4	0	2	3	5	505	31	102	91	72	56	698
KAB. BELITUNG TIMUR	1.535	0	9	150	261	1.388	31	4	670	268	83	2	0	117	29	4	3	0	0	5	4	181	15	43	33	129	72	379
KOTA PANGKAL PINANG	4.187	5	102	164	233	5.883	398	44	1.501	697	33	1	3	172	58	20	13	3	6	4	147	732	142	182	205	415	1	2.624

Sumber : DP3ACSKB (data Olahan), 2021

#### 1.4. Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi

Pemberdayaan perempuan merupakan alat agar perempuan menjadi lebih berkualitas. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif dan juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam kelembagaan masyarakat.

Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan taraf hidup perempuan. Jika seseorang perempuan mempunyai kedudukan strategis dalam pengambilan keputusan. Maka secara otomatis akan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup perempuan secara umum. Bahkan, daya ungkit hal ini merupakan daya ungkit yang paling besar dibandingkan faktor lainnya. Perempuan yang mengisi jabatan ini sebagian besar berlatar pendidikan yang mumpuni serta memiliki keahlian yang spesial. Perempuan dengan jabatan tersebut juga umumnya mempunyai pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan di bawahnya. Sehingga, perempuan yang mengisi jabatan-jabatan pekerjaan sebagai manajer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan perempuan yang berkualitas tinggi. Hal inilah yang mendorong meningkatnya IPM perempuan baik pada dimensi pendidikan maupun ekonomi (daya beli). Berikut adalah data persentase tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi menurut jenis kelamin di Bangka Belitung

**Tabel IV.22 Persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin (Persen)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin (Persen)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	45.90	48.30	42,36	54.10	51.70	57,64
Bangka	47.91	46.65	40,01	52.09	53.35	59,99
Belitung	44.36	49.02	44,74	55.64	50.98	55,26
Bangka Barat	37.16	44.95	41,57	62.84	55.05	58,43
Bangka Tengah	46.18	37.09	41,81	53.82	62.91	58,19
Bangka Selatan	45.22	46.75	43,89	54.78	53.25	56,11
Belitung Timur	39.97	40.68	37,31	60.03	59.32	62,69
Pangkalpinang	52.25	56.15	45,45	47.75	43.85	54,55

ber : BPS, 2024

Dari data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Bangka Belitung perempuan ikut dan memegang peran penting dalam pekerjaan yang bisa dianggap strategis

## 2. SOSIAL

### a. Penduduk Penyandang Cacat/ disabilitas

Penduduk disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Keterbatasan ini dapat membuat mereka kesulitan berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang, atau sekitar 5% dari total penduduk.

Beberapa hak yang dimiliki penyandang disabilitas, di antaranya:

- Hak atas penghormatan integritas
- Hak untuk tidak dirampas nyawanya
- Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya
- Hak untuk bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, dan pengucilan
- Hak untuk bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi

Untuk angka penyandang cacat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel berikut

**Tabel. IV. 23 Angka penyandang Cacat Provinsi Kepulauan Bangka Blitung**

WILAYAH S	PENYANDANG CACAT											Σ CACAT
	CACAT FISIK	TUNA NETRA	TUNA RUNGU	TUNA WICARA	TUNA RUNGU & WICARA	TUNA NETRA & CACAT TUBUH	TUNA NETRA, RUNGU & WICARA	TUNA RUNGU, WICARA & CACAT TUBUH	TUNA RUNGU, WICARA, NETRA & CACAT TUBUH	CACAT MENTAL RETAR DASI	CACAT FISIK & MENTAL	
Kab. Bangka	363	113	113	68	61	30	13	17	9	329	193	1.309
Kab. Belitung	190	89	55	32	31	6	6	6	1	166	56	638
Kab. Bangka Selatan	173	109	72	49	25	7	9	8	4	130	78	664
Kab. Bangka Tengah	308	75	70	43	33	17	1	13	9	202	125	896
Kab. Bangka Barat	342	119	91	49	49	13	7	17	9	239	114	1.049
Kab. Belitung Timur	246	96	37	26	30	3	4	7	3	200	54	706
Kota Pangkalpinang	172	61	51	40	29	14	8	13	12	154	86	640
Prov. Kep. Bangka Belitung	1.794	662	489	307	258	90	48	81	47	1.420	706	5.902

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Angka penduduk penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5.837 Orang Artinya bahwa sebagian kecil penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyandang cacat. Namun ini tetap menjadi perhatian pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

### b. Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

**Tabel. IV. 24 Penduduk Miskin Penerima Jaminan kesehatan**

Penduduk Miskin	∑ Penduduk Miskin penerima Jamkes	∑ Penduduk Miskin	%
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	266.309	413.761	64,36

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator penduduk miskin ini berguna untuk menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin, seperti pelayanan kesehatan. Dari data tersebut diatas 66,39 % penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapat pelayanan kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Keluarga Penerima Manfaat

Indikator Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan adalah data yang menunjukkan jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pangan dan anggaran yang dialokasikan untuknya. Data ini dapat dilihat secara provinsi atau kabupaten/kota.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang menerima bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini diberikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jumlah KPM penerima bantuan selalu berubah setiap tahun karena data penerima bantuan selalu diperbarui. Kondisi KPM di bangka Belitung dapat di lihat pada tabel berikut;

**Tabel. IV.25 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023**

Kabupaten/Kota	Rencana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN) (Rp)	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN) (Rp)
Bangka	28.632,00	27.819,00	17.151.000.000,00	16.691.400.000,00
Belitung	45.472,00	43.831,00	18.392.200.000,00	17.722.200.000,00
Bangka Barat	27.495,00	27.036,00	16.496.600.000,00	16.221.600.000,00
Bangka Tengah	24.311,00	23.873,00	14.578.000.000,00	14.323.800.000,00
Bangka Selatan	21.290,00	20.767,00	12.774.000.000,00	12.460.200.000,00
Belitung Timur	22.178,00	21.767,00	13.300.800.000,00	13.060.200.000,00
Kota Pangkal Pinang	37.948,00	35.531,00	15.673.000.000,00	14.680.400.000,00
Kepulauan Bangka Belitung	207.326,00	200.624,00	108.365.600.000,00	105.159.800.000,00

Sumber : BPS, 2024

## E. GENDER BIDANG KESEHATAN

Bicara kesehatan sangat terkait dengan kondisi dan pola hidup sehat. Faktor lingkungan serta kesediaan Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Keberadaan layanan kesehatan masyarakat sangat penting sehingga masyarakat dapat merujuk di rumah sakit yang layak dalam mengatasi problem kesehatannya. Berikut data rumah sakit/ puskesmas :

**Tabel IV.26 Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Posyandu, Klinik dan Polindes di Bangka Belitung**

No	Kab./Kota	Rumah sakit	Rumah bersalin	puskesmas	posyandu	klinik	polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bangka	4	3	12	226	1	79
2	Kab. Bangka Barat	1	1	8	182	-	58
3	Kab. Bangka Selatan	1	0	10	221	1	53
4	Kab. Bangka Tengah	1	0	8	138	-	67
5	Kab. Belitung	1	1	9	149	-	43
6	Kab. Belitung Timur	1	0	7	139	-	28
7	Kota Pangkalpinang	1	4	9	116	2	25
	Jumlah	10	9	63	1.171	4	353

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data di atas tergambar bagaimana concern/perhatian pihak pemerintah, swasta dan seluruh stakeholders terkait peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

### 1) Angka Harapan Hidup

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan.

Salah satu indikator pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini diharapkan mampu mencerminkan "lama hidup" dan "hidup sehat". Lama hidup seseorang, tidak terlepas dari kesehatan seseorang. Angka harapan hidup juga sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia tercatat sebesar 73,93 tahun pada 2023. Angka tersebut meningkat 0,4 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,5 tahun. Melihat trennya, AHH di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2014-2023. Kenaikannya pun mencapai 3,32/tahun dari 70,61/tahun menjadi 73,93/tahun. Berdasarkan gendernya, AHH perempuan di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan laki-laki. Pada 2023, AHH perempuan di Indonesia sebesar 76,37/tahun, sedangkan laki-laki hanya 71,61/tahun. Sebagai informasi, AHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir. AHH juga merupakan metrik untuk menilai kesehatan suatu masyarakat. Sekarang bagaimana kondisi Angka

Harapan Hidup di Bangka Belitung? Berikut disajikan data table Angka Harapan Hidup di Bangka Belitung.

**Tabel. IV.27 Angka Harapan Hidup Perempuan di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020 sd 2023**

Wilayah Babel	Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	72.59	72.70	72.97	73,26
Bangka	72.94	73.00	73.23	73,63
Belitung	72.93	73.00	73.23	73,57
Bangka Barat	71.98	72.03	72.24	72,44
Bangka Tengah	73.23	73.39	73.70	74,16
Bangka Selatan	70.10	70.34	70.72	71,02
Belitung Timur	73.91	74.00	74.26	74,65
Kota Pangkalpinang	75.12	75.23	75.51	75,9

Sumber; BPS 2024

Melihat data di atas dibandingkan dengan angka harapan hidup perempuan di Bangka Belitung dengan perbandingan antara Angka Harapan hidup laki-laki di Provinsi Bangka Belitung ternyata angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 73,26/tahun untuk perempuan dan 69.3/tahun untuk laki-laki. Berikut tabel Angka Harapan Hidup laki-laki di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020 sd 2023.

**Tabel IV. 28 Angka Harapan Hidup laki-laki di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020 sd 2023**

Wilayah Babel	Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-laki (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	68.77	68.86	69.06	69,3
Bangka	69.06	69.15	69.34	69,65
Belitung	69.04	69.09	69.24	69,6
Bangka Barat	68.05	68.07	68.19	68,51
Bangka Tengah	69.39	69.57	69.84	70,16
Bangka Selatan	66.10	66.26	66.51	67,05
Belitung Timur	70.07	70.15	70.35	70,62
Kota Pangkalpinang	71.36	71.48	71.71	72,18

Sumber; BPS 2024

## 2) Kematian

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi.

**Tabel IV. 29 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/MMR)**

WILAYAH	∑ Kelahiran Hidup	∑ Kematian Ibu Maternal				AKI
		Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
BANGKA	5.236	-	-	3	3	57,30
BELITUNG	2.776	1	2	3	6	216,14
BANGKA SELATAN	2.807	-	-	3	3	106,88
BANGKA TENGAH	3.291	1	-	6	7	212,70
BANGKA BARAT	3.294	4	1	2	7	212,51
BELITUNG TIMUR	1.788	1	-	2	3	167,79
PANGKALPINANG	3.922	1	-	4	5	127,49
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	23.114	8	3	23	34	147,10

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Dari tabel di atas diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 100.000 kelahiran hidup terdapat 147 kematian ibu saat hamil, bersalin maupun pasca bersalin

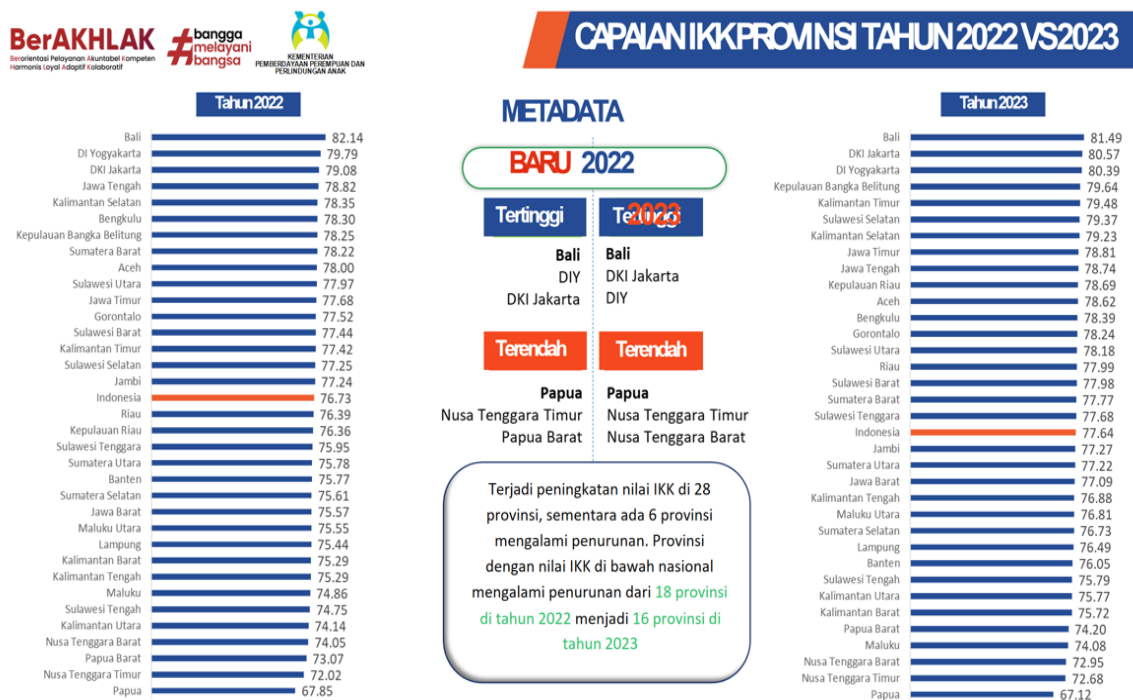
## F. KUALITAS KELUARGA

Kebijakan pembangunan keluarga merupakan amanah utama dari Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pada Bagian H adanya Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Sub Urusan Nomor 3 yaitu Kualitas Keluarga. Disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat salah satunya adalah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.

Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang tercantum dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa konsep kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi keluarga dalam masyarakat.

Dalam hal pengukuran kualitas keluarga KemenPPPA kemudian menyusun indikator yang menggambarkan kualitas keluarga dengan menggunakan beberapa variable pendukungnya. Berikut adalah gambaran capaian indeks kualitas keluarga di Indonesia dan Bangka Belitung

Gambar. IV. 1 Capaian Indeks Kualitas Keluarga tahun 2023



Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Melihat gambaran data diatas capaian Indeks Kualitas Keluarga provinsi Bangka Belitung sudah diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 79,23 persen pada tahun 2023 sedangkan nasional berada di angka 77,00 persen dan Bangka Belitung berada di urutan ke 4 terbaik. Kemudian data-data terkait keluarga dapat dilihat pada uraian berikut :

### 1) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab- sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

**Tabel IV.30 Kepala Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jenis Kelamin**

WILAYAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kab. Bangka	86.562	81,6	19.576	18,4	106.138	23,3
Kab. Belitung	53.000	81,8	11.831	18,2	64.831	11,6
Kab. Bangka Selatan	57.612	84,1	10.860	15,9	68.472	14,0
Kab. Bangka Tengah	53013	81,1	12351	18,9	65.364	12,0
Kab. Bangka Barat	56.628	82,8	11.768	17,2	68.396	13,6
Kab. Belitung Timur	37.818	82,2	8.176	17,8	45.994	9,2
Kota Pangkalpinang	61.129	79,0	16.277	21,0	77.406	16,3
<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>405.762</b>	<b>81,7</b>	<b>90.839</b>	<b>18,3</b>	<b>496.601</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 81,7 % dikepalai laki-laki dan 18,3 % dikepalai oleh seorang perempuan. Dengan adanya kepala keluarga yang dikepalai perempuan diduga menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi baik cerai hidup maupun cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern karena kemandiriannya makanya perempuan berani untuk hidup sendiri.

## 2) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

**Tabel IV.31 Kepala Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Status Kawin dan Jenis Kelamin**

STATUS KAWIN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L+P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
BELUM KAWIN	20.503	5,1	9.735	10,7	30.238	6,1
KAWIN	355.284	87,6	15.983	17,6	371.267	74,8
CERAI HIDUP	13.714	3,4	16.139	17,8	29.853	6,0
CERAI MATI	16.261	4,0	48.932	53,9	65.193	13,1
<b>JUMLAH</b>	<b>405.762</b>	<b>100,0</b>	<b>90.789</b>	<b>100,0</b>	<b>496.551</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Dari tabel ini, terlihat bahwa secara keseluruhan bahwa kepala keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Semester II Tahun 2023 berstatus kawin yakni 74,8%, dan

adanya kepala keluarga berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 6,1%, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 18,1%.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki yakni 87,6%, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yakni 17,6%. Selanjutnya dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) persentasenya lebih rendah yakni 5,1% dari pada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang sebesar 10,7%.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 7,4% daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai yakni 71,7%.

### 3) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga itu.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

**Tabel IV.32 Karakteristik Kepala Keluarga menurut Pendidikan**

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tidak/Belum Sekolah	10.526	2,6	6.275	6,9	16.801	3,4
Belum Tamat SD/Sederajat	18.792	4,6	7.816	8,6	26.608	5,4
Tamat SD/Sederajat	157.019	38,7	44.412	48,9	201.431	40,6
SLTP/Sederajat	65.645	16,2	11.992	13,2	77.637	15,6
SLTA/Sederajat	118.028	29,1	15.619	17,2	133.647	26,9
Diploma I/II	2.484	0,6	714	0,8	3.198	0,6
Akademi/Diploma III/S. Muda	8.088	2,0	1.211	1,3	9.299	1,9
Diploma IV/Strata I	23.386	5,8	2.615	2,9	26.001	5,2
Strata II	1.709	0,4	127	0,1	1.836	0,4
Strata III	85	0,0	8	0,0	93	0,0
<b>JUMLAH</b>	<b>405.762</b>	<b>100,0</b>	<b>90.789</b>	<b>100,0</b>	<b>496.551</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 40,6%, disusul dengan tamat SLTA/Sederajat sebesar 26,9%, dan SLTP/Sederajat 15,6%. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan DI/D2/D3 hanya sebesar 2,5% dan S1/S2/S3 sebesar 5,6%. Kepala keluarga yang tidak sekolah dan tidak menamatkan pendidikan dasarnya sebesar 8,8%.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka

---

tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

#### 4) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

**Tabel IV.33 Distribusi Kepala Keluarga menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023**

STATUS BEKERJA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
Bekerja	387.010	96,5	17.235	19,4	404.245	82,5
Belum/Tidak Bekerja	5.872	1,5	4.993	5,6	10.865	2,2
Pelajar/Mahasiswa	3.073	0,8	1.645	1,9	4.718	1,0
Pensiunan	4940	1,2	1152	1,3	6.092	1,2
Mengurus Rumah Tangga	17	0,0	63.845	71,8	63.862	13,0
<b>Jumlah</b>	<b>400.912</b>	<b>100,0</b>	<b>88.870</b>	<b>100,0</b>	<b>489.782</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data SIAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2023, diolah*

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa sekitar 82,5,5% kepala keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja. Angka ini lebih tinggi kepala keluarga laki-laki dari pada perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu sekitar 2,2% kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota nya perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga yaitu didominasi perempuan sebesar 71,8%. Selanjutnya dari tabel tersebut, terlihat adanya kepala keluarga yang telah pensiun sebesar 1,2%.

---

**BAB V**  
**GAMBARAN KESEJAHTERAAN ANAK**  
**DI BANGKA BELITUNG**

Anak adalah penduduk yang berusia sebelum genap 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Namun untuk mengukur jumlah anak tentu akan kesulitan jika menghitung jumlah anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, dalam profil anak, belum bisa memunculkan data anak dalam kandungan meskipun janin dalam kandungan juga disebut sebagai anak. Mengingat anak adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang penting bagi setiap orang dan masa anak adalah masa yang sangat rentan perubahannya, maka usia anak dikelompokkan dalam 3 periode penting yaitu masa balita, masa usia sekolah dan masa remaja. Untuk balita kita lihat dari kelompok umur 0-4 tahun, sedangkan untuk anak usia sekolah kita lihat dari usia 5- 17 tahun dan usia remaja kita lihat pada kelompok umur 10-17 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel V. 1 Jumlah anak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BANGKA	53.427	50.163	103.590
2	BELITUNG	27.957	26.390	54.347
3	BANGKA SELATAN	33.089	30.886	63.975
4	BANGKA TENGAH	34.475	31.963	66.438
5	BANGKA BARAT	34.965	32.696	67.661
6	BELITUNG TIMUR	19.314	18.109	37.423
7	PANGKALPINANG	38.255	35.763	74.018
PROV. KEP BANGKA BELITUNG		241.482	225,970	241.708

*Sumber : diolah dari data SIAK semester II Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk usia anak (dibawah 18 Tahun) lebih banyak berjenis kelamin laki laki dibanding anak perempuan, meskipun bedanya tidak terlalu signifikan. Sementara jumlah anak paling banyak ada di Kabupaten Bangka, dan paling sedikit ada di Kabupaten Belitung Timur.

---

## **A. Kondisi kesejahteraan anak**

Kesejahteraan adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai kepuasan. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara. Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah.

Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak – hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi permasalahan anak tersebut. Karena anak merupakan generasi masa depan yang harus diperhatikan kesejahteraannya agar perkembangannya pun baik. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya.

Berkaitan dengan kesejahteraan anak pemerintah pusat telah menetapkan indikator yang menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan anak di setiap daerah. Awal indikator tersebut adalah indeks komposit kesejahteraan anak yang kemudian di ubah menjadi indeks perlindungan anak. Untuk mengetahui capaian indeks perlindungan anak berikut disajikan melalui gambar dibawah ini.

Gambar V.1 Indeks Perlindungan Anak Tahun 2023

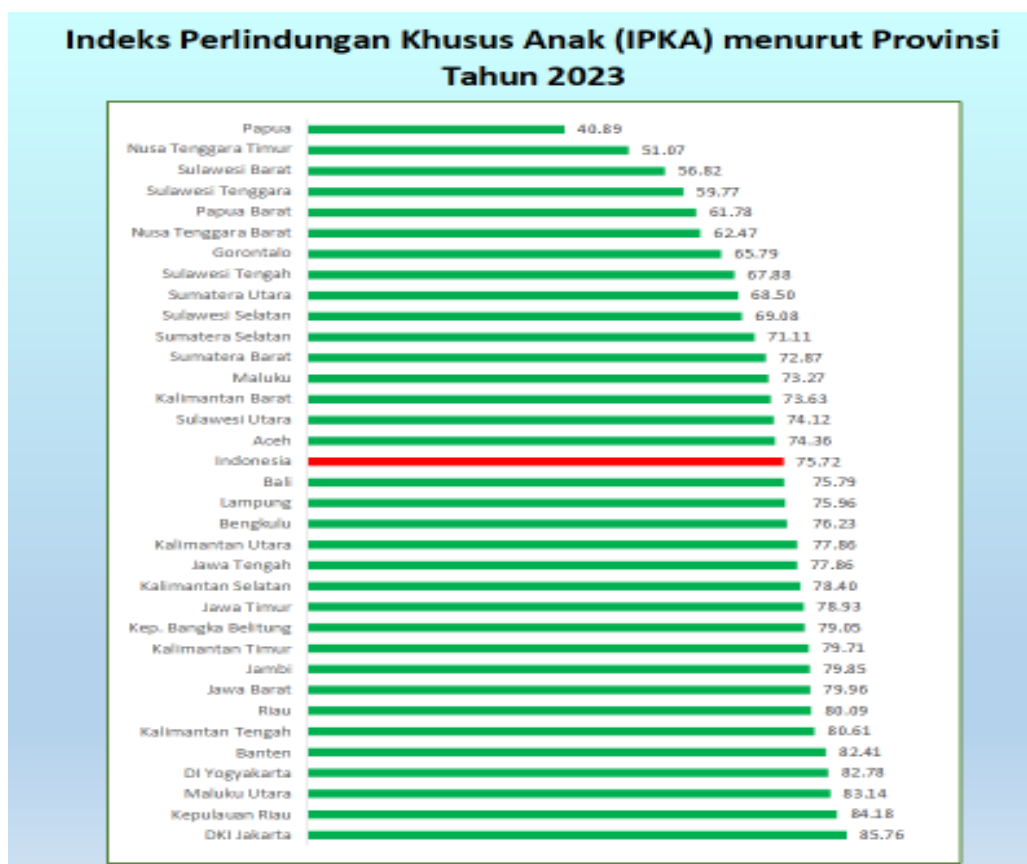


Sumber: Kementerian PPA, 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat tingkat kesejahteraan anak yang di gambarkan melalui indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Bangka Belitung pada tahun 2023 berada di atas rata-rata nasional yaitu 64,25 sedangkan capaian nasional 63,83. Hal ini dapat disimpulkan ada beberapa klaster yang menjadi unsur penilaian terjadi peningkatan.

Berkaitan dengan indeks perlindungan anak terdapat 2 indikator sebagai penunjang capaian IPA, yaitu indikator Indeks Perlindungan khusus anak dan indeks pemenuhan hak-hak anak. Terkait capaian kedua indeks tersebut dalah dilihat dari gambar berikut :

Gambar V.2 Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023

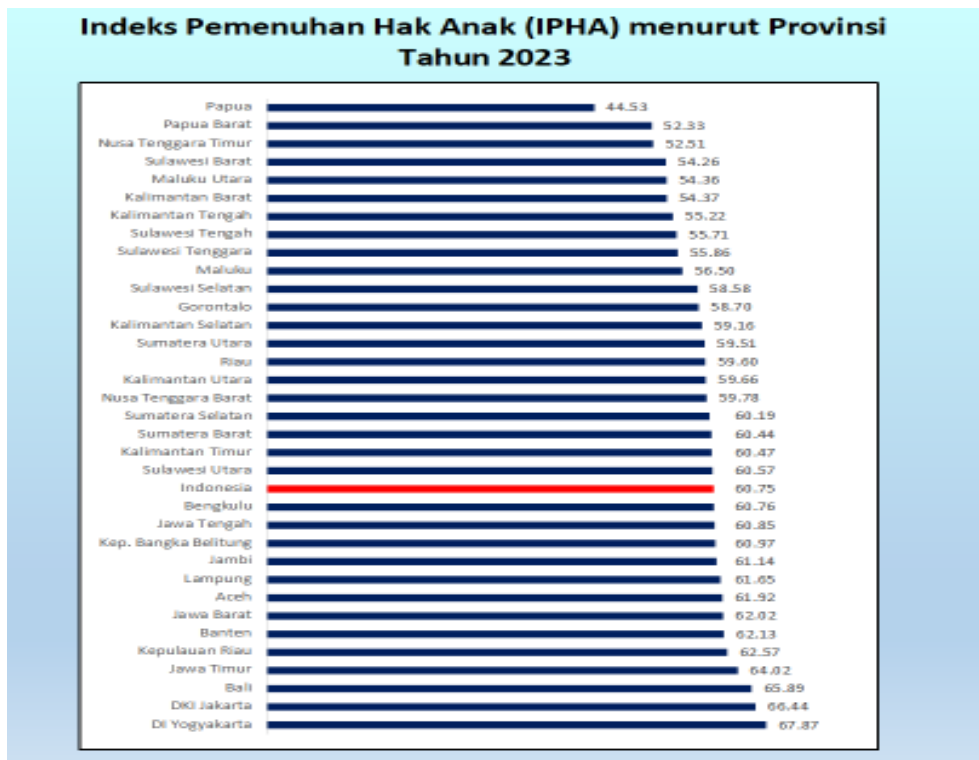


Sumber: Kementerian PPA, 2024

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa untuk indeks perlindungan anak (IPKA) di Bangka Belitung pada tahun 2023 masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 79,05 sedangkan capaian nasional 75,72.

Kemudian Untuk dapat melihat dan mengukur sudah sejauh mana pemenuhan hak anak di Indonesia, maka digunakan satu ukuran yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Capaian IPHA Bangka Belitung pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar IV.3. IPHA Bangka Belitung pada tahun 2023 berada di angka 60,97 dan berada diatas rata-rata nasional yaitu 60,75 pada tahun 2023. Berikut gambar Indeks Perlindungan Hak-hak Anak Tahun 2023

Gambar V.3 Indeks Perlindungan Hak-hak Anak Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPA, 2024

## B. Pendidikan anak

Pada tahun 1923, Jebb mengusulkan draft tentang deklarasi anak-anak di Liga Bangsa-Bangsa Jenewa. Kemudian tahun 1954, PBB mengumumkan tentang hak-hak anak. Akhirnya pada tahun 1989, draft tersebut disahkan sebagai Konvensi hak anak. Di Indonesia konvensi hak anak tersebut disetujui melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 28 Agustus 1990. Dan salah satu hak anak tersebut adalah hak pendidikan.

Pentingnya pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan Penunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah baik dari pendidikan formal, nonformal dan Informal. Keadilan dan Kesetaraan bisa terwujud melalui pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara meluruh supaya pendidikan dapat meningkatkan Peradaban negeri ini. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan Taraf hidup yang lebih baik.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih banyak terdapat permasalahan seperti yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Prof Bustami Rahman,

mengatakan, persoalan pendidikan di Babel saat ini masih terkait masalah mutu, ketersediaan Infrastruktur, keterjangkauan sekolah dan angka partisipasi kasar atau ajakan orang tua untuk anaknya sekolah hingga setinggi-tingginya. Selain itu, persoalan keterjangkauan sekolah dengan anak didiknya, dan juga sebaliknya menjadi komponen dalam upaya meningkatkan Pendidikan di Bangka Belitung.

Untuk melihat perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Berikut disajikan data angka partisipasi kasar (APK) di Bangka Belitung

**Tabel V. 2 Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA tahun 2021 s.d 2023**

38 Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan								
	SD/ sederajat			SMP/ sederajat			SM/ sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	108,1	108,34	108,48	97,74	95,02	95,51	92,63	92,53	93,8
SUMATERA UTARA	107,85	108,31	106,85	91,87	90,31	92,11	96,75	97,23	98,02
SUMATERA BARAT	108,66	108,47	108,03	93,24	92,57	92,66	90,38	90,66	92
RIAU	105,52	105,82	105,35	95,25	94,45	92,91	84,11	84,85	85,12
JAMBI	109,48	109,55	108,29	88,96	87,84	88,2	84,47	84,33	85,23
SUMATERA SELATAN	111,39	112	110,51	89,44	89,41	89,78	82,3	81,11	82,26
BENGKULU	109,31	109,23	107,67	92,11	90,79	93,1	93,79	93,97	94,53
LAMPUNG	105,63	105,91	105,31	93,12	92,37	91,19	88,38	87,4	89,12
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>107,16</b>	<b>107,26</b>	<b>106,09</b>	<b>88,44</b>	<b>87,85</b>	<b>88,51</b>	<b>86,49</b>	<b>86,5</b>	<b>88,28</b>
KEP. RIAU	106,6	106,26	105,96	94,12	93,27	92,58	86,31	87,08	90,58
DKI JAKARTA	103,17	103,34	103,63	91,56	89,89	95,78	77,08	76,91	77,4
JAWA BARAT	104,57	104,55	104,53	93,33	93,46	94,69	78,1	78,86	79,07
JAWA TENGAH	106,4	106,19	105,01	94	94,05	92,8	86,65	86,83	87,84
DI YOGYAKARTA	105,15	104,96	104,52	95,54	94,02	94,28	90,5	89,93	90,82
JAWA TIMUR	104,52	104,68	103,71	97,17	95,95	94,74	87,55	87,37	89,26
BANTEN	106,91	106,89	106,96	94,88	94,05	95,71	75,66	75,49	75,02
BALI	103,09	103,16	102,7	98,68	96,23	98,18	89,87	90,82	93,4
NUSA TENGGARA BARAT	107,23	107,21	107,07	93,72	92,59	93,32	93,75	93,68	93,23
NUSA TENGGARA TIMUR	113,55	113,36	111,35	90,78	89,88	90,41	86,36	86,38	88,66
KALIMANTAN BARAT	111,01	111,84	109,46	85,45	84,59	84,49	85,21	84,79	88,52
KALIMANTAN TENGAH	108,21	107,39	106,98	91,07	89,7	88,06	83,07	83,97	85,63
KALIMANTAN SELATAN	107,14	107,18	107,41	86,04	86,4	86,44	80,77	80,97	82,21
KALIMANTAN TIMUR	105,26	105,21	106,46	92,03	91,47	92,28	95,52	95,09	95,16
KALIMANTAN UTARA	99,78	100,7	101,52	100,9	99,85	97,6	96,55	97,57	97,78
SULAWESI UTARA	106,56	106,48	105,41	90,45	89,63	90,12	86,17	86,03	86,03
SULAWESI TENGAH	103,68	103,55	102,66	93,17	92,86	93,06	88,06	87,99	88,69
SULAWESI SELATAN	106,85	106,71	106,65	86,82	86,19	87,15	87,07	86,49	88,04
SULAWESI TENGGARA	108,22	108,48	108,23	87,54	86,04	85,28	89,5	89,14	90,31

GORONTALO	108,44	108,7	108,75	79,37	79,37	79,66	87,97	87,83	89,11
SULAWESI BARAT	105,09	106,08	104,23	85,27	84,58	84,95	87,81	87,86	89,18
MALUKU	110,79	111,05	108,9	90,57	87,85	90,35	95,74	95,96	95,96
MALUKU UTARA	108,07	108,05	107,81	87,99	88,35	88,17	95,04	95,4	95,64
PAPUA BARAT	111,02	110,42	109,24	90,55	90,45	91,41	97,25	97,71	96,79
PAPUA	93,07	94,26	91,1	81,68	83,51	81,91	75,05	77,06	73,9
INDONESIA	106,2	106,27	105,62	92,8	92,11	92,51	85,23	85,49	86,34

Sumber; BPS 2024

Dari data di atas diketahui bahwa dari jenjang SMP sampai dengan SMA angka partisipasi kasar di Bangka Belitung masih dibawah nasional. Contoh pada tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama di Bangka Belitung memiliki capaiannya sebesar 88,51 persen sedangkan nasional sudah mencapai 92,11 Persen. Untuk sekolah menengah atas data capaian Bangka Belitung pada tahun 2023 yaitu sebesar 92,51 persen

Untuk melihat seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh di Bangka Belitung berikut disajikan data tentang angka partisipasi murni (APM)

**Tabel V. 3 Angka Partisipasi Murni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA tahun 2021 s.d 2023**

38 Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan								
	SD/ sederajat			SMP/ sederajat			SM/ sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	98,95	99,07	98,97	86,95	88,21	84,85	70,8	71,16	71,7
SUMATERA UTARA	97,69	98	97,95	81,13	81,84	82,09	67,99	68,27	68,67
SUMATERA BARAT	98,82	98,8	98,89	78,75	78,86	80,22	68,99	68,38	69,18
RIAU	97,85	97,8	98,13	80,52	80,43	80,76	64	63,87	64,81
JAMBI	99,41	99,33	99,33	79,88	79,93	80,23	61,56	60,73	60,6
SUMATERA SELATAN	98	98,08	98,12	78,31	78,68	79,12	60,53	61	61,24
BENGKULU	98,61	98,6	98,61	80,25	80,25	81,08	66,08	66,61	67,09
LAMPUNG	99,1	99,29	99,22	82,03	82,07	80,64	60,31	61,96	62,84
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>97,89</b>	<b>98,01</b>	<b>98,11</b>	<b>74,6</b>	<b>74,68</b>	<b>77</b>	<b>58,79</b>	<b>59,65</b>	<b>60,72</b>
KEP. RIAU	99,26	99,2	99,29	86,6	86,76	86,78	73,36	73,54	74,11
DKI JAKARTA	98,22	98,37	98,44	83,01	84,22	84,95	60,53	60,88	60,81
JAWA BARAT	98,37	98,29	98,2	82,88	82,8	83,61	58,58	58,6	59,01
JAWA TENGAH	98,22	98,39	98,46	80,99	81,02	81,56	60,46	61,17	61,46
DI YOGYAKARTA	99,44	99,43	99,36	83,62	85,28	85,62	71,42	74,5	76,37
JAWA TIMUR	97,9	98,09	98,04	83,8	83,8	83,91	62,63	62,1	62,59
BANTEN	98,15	97,93	97,97	84,28	84,67	85,43	59,69	59,54	60,42

BALI	97,2	97,46	97,77	87,11	86,88	84,78	74,82	74,73	75,6
NUSA TENGGARA BARAT	98,81	98,83	98,76	85,28	86,05	84,03	67,09	67,61	68,04
NUSA TENGGARA TIMUR	96,04	96,08	95,98	69,99	70,05	73,47	54,29	56	58,15
KALIMANTAN BARAT	97,42	97,52	97,7	68,11	68,32	70,85	51,77	51,87	54,76
KALIMANTAN TENGAH	99,01	99,11	99,05	78,8	78,75	79,07	54,25	55,69	55,63
KALIMANTAN SELATAN	98,94	99,12	99,14	75,88	76,28	77,44	58,37	59,61	59,83
KALIMANTAN TIMUR	98,36	98,45	98,53	81,3	82,65	83,36	69,29	69,1	69,89
KALIMANTAN UTARA	93,38	93,69	94,73	79,21	79,38	80,53	65,37	65,65	66,7
SULAWESI UTARA	95,39	95,44	95,68	74,94	76,11	76,56	63,33	63,3	63,86
SULAWESI TENGAH	93,33	93,25	93,31	74,99	75,63	76,8	65,44	65,72	66,18
SULAWESI SELATAN	98,26	98,41	98,41	77,02	77,42	77,98	60,35	60,44	60,57
SULAWESI TENGGARA	98,15	98,27	98,48	77,86	77,77	76,54	63,7	64,11	64
GORONTALO	98,65	98,74	98,69	71,15	71,66	73,55	58,21	58,47	60,18
SULAWESI BARAT	95,68	95,81	95,92	70,03	70,34	72,39	59,77	60,24	61,17
MALUKU	96,92	96,9	97,27	75,53	78,37	78,58	64,71	64,57	66,16
MALUKU UTARA	97,2	97,27	97,36	77,03	77,41	78,53	64,11	65,35	65,75
PAPUA BARAT	94,09	94,31	94,52	70,52	71,38	74,7	63,51	63,66	65,92
PAPUA	80,38	81,66	80,67	57,93	59,14	60,23	44,41	47,63	48,32
<b>INDONESIA</b>	<b>97,8</b>	<b>97,88</b>	<b>97,89</b>	<b>80,59</b>	<b>80,89</b>	<b>81,35</b>	<b>61,65</b>	<b>61,97</b>	<b>62,53</b>

Sumber; BPS 2024

Dilihat dari data di atas hampir semua jenjang capaiannya masih berada di bawah capaian nasional

Selain itu untuk melihat perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase dapat dilihat melalui angka partisipasi sekolah. Berikut disajikan data tentang angka partisipasi sekolah di Bangka Belitung.

**Tabel V. 4 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA tahun 2019 s.d 2022**

38 Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi											
	12/07/2001			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	99,67	99,44	99,43	98,42	97,96	97,72	83,28	83,1	83,41	32,61	31,72	33,1
SUMATERA UTARA	99,32	99,5	99,51	96,99	96,78	96,76	78,66	78,66	79,25	27,05	26,6	28,61

SUMATERA BARAT	99,61	99,55	99,76	96,63	96,52	96,79	84,07	83,71	84,33	36,41	35,41	38,08
RIAU	99,65	99,61	99,65	95,66	95,72	95,89	77,81	77,32	78,15	28,79	28,65	30,07
JAMBI	99,66	99,33	99,49	96,39	96,2	96,01	72,5	72,53	72,46	24,14	23,35	23,98
SUMATERA SELATAN	99,65	99,38	99,41	94,85	95,06	95,27	71,53	70,93	71,71	18,81	18,61	19,79
BENGKULU	99,76	99,49	99,42	97,49	97,73	97,91	79,75	79,31	79,57	30,46	29,42	30,74
LAMPUNG	99,53	99,56	99,61	95,58	95,63	95,93	71,72	71,14	71,74	21,17	20,72	21,66
KEP. BANGKA BELITUNG	99,47	99,41	99,51	93,17	93	93,2	68,15	68,42	69,53	18,02	17,68	17,59
KEP. RIAU	99,62	99,28	99,29	98,85	99,01	99,07	84,4	84,54	84,97	19,83	19,5	20,51
DKI JAKARTA	99,53	99,44	99,49	98,68	97,95	98,17	72,32	72,1	72,5	24,92	24,89	26,52
JAWA BARAT	99,5	99,39	99,4	95,09	95,27	95,75	67,8	68,66	68,58	23,51	23,99	24,72
JAWA TENGAH	99,66	99,58	99,57	96,84	96,77	97,08	70,79	70,82	70,87	23,55	23,76	24,59
DI YOGYAKARTA	99,7	99,59	99,63	99,43	99,01	98,88	89,63	89,95	91,17	51,41	50,43	51,6
JAWA TIMUR	99,4	99,14	99,28	97,76	97,64	97,64	74,14	73,4	74,07	26,27	26,21	26,53
BANTEN	99,45	99,33	99,43	96,77	96,39	96,65	68,94	69,22	69,64	21,59	22,14	23,72
BALI	99,7	99,55	99,61	98,22	97,85	97,95	83,96	83,84	84,73	28,95	30,18	30,92
NUSA TENGGARA BARAT	99,52	99,17	99,46	98,34	97,74	97,95	77,49	77,43	77,46	26,22	25,64	26,42
NUSA TENGGARA TIMUR	98,42	98,59	98,62	95,32	94,83	94,89	75,77	75,55	75,93	30,54	29,36	30,68
KALIMANTAN BARAT	98,64	98,73	98,81	93,14	92,64	92,92	69,38	68,72	69,25	24,57	24,5	25,08
KALIMANTAN TENGAH	99,55	99,2	99,13	95,21	94,61	95,21	66,7	66,32	66,32	24,47	24,29	23,27
KALIMANTAN SELATAN	99,38	99,43	99,3	93,5	94,01	94,12	69,31	69,88	69,95	24,7	24,52	27,18
KALIMANTAN TIMUR	99,6	99,57	99,64	98,9	98,75	98,71	82,01	81,43	81,5	29,86	29,33	32,33
KALIMANTAN UTARA	98,67	98,98	99,22	96,51	97,03	96,96	76,5	76,5	77,03	25,02	25,62	27,63
SULAWESI UTARA	99,37	99,34	99,34	95,41	94,86	95	73,86	74,33	74,55	23,67	23,43	23,57
SULAWESI TENGAH	98,5	98,22	98,34	93,32	93,02	93,13	76,32	75,84	76,29	28,22	27,04	27,58
SULAWESI SELATAN	99,29	99,43	99,49	93,55	93,2	93,22	71,21	70,81	71	35,08	35,07	34,47
SULAWESI TENGGARA	99,16	99,05	99,2	95,06	94,8	95	75,02	74,53	74,6	31,97	31,81	31,73
GORONTALO	99,02	98,93	98,69	92,05	91,83	91,85	71,3	71,68	71,7	31,66	30,06	33,2
SULAWESI BARAT	98,19	98,4	98,31	90,12	89,39	89,47	71,22	70,85	71,57	23,8	23,43	23,98
MALUKU	99,52	99,55	99,59	97,65	97,69	97,97	79,68	79,03	79,9	39,03	40,15	37,41
MALUKU UTARA	98,84	99,13	99,12	97	97,59	97,51	77,01	77,7	78,38	31,23	30,67	28,78
PAPUA BARAT	98,08	98,27	98,41	96,85	97,37	97,42	81,21	80,56	80,58	30,92	30,69	31,15
PAPUA	83,43	84,35	83,61	80,02	81,66	80,91	63,98	65,93	64,15	22,9	23,58	23,89
INDONESIA	99,19	99,1	99,16	95,99	95,92	96,1	73,09	73,15	73,42	26,01	25,99	26,85

Sumber; BPS 2024

Sama halnya dengan angka partisipasi murni dari data di atas dapat dilihat pula pada angka partisipasi sekolah pun hampir semua jenjang pada tahun 2023 capaiannya masih berada di bawah capaian nasional.

Sekolah merupakan unsur penting dalam pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah negeri, yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar, sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah

---

pengawasan guru. Mutu sekolah sangat bergantung pada proses, pembelajaran ini yang bisa ditunjang oleh penyedia fasilitas oleh sekolah, baik dalam bentuk fisik (sarana dan prasarana) maupun kompetensi tenaga pengajar. Semakin baik fasilitas sekolah, kemungkinan kelulusannya pun juga baik.

Permasalahan di Bangka Belitung terkait dengan sekolah adalah jarak sekolah dari tempat pelajar. Sehingga menyebabkan banyak dari anak-anak maupun orang tua enggan menyekolahkan anak mereka dikarenakan jarak menuju sekolah yang cukup jauh. Untuk mengetahui jumlah sekolah di Bangka Belitung berikut di sajikan dalam tabel dibawah ini;

Tabel V. 5 Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tingkat SD sampai dengan SMA

No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S			
1	Kab. Bangka	455	223	232	75	8	67	88	0	88	13	0	13	6	0	6	11	0	11	1	1	0	183	166	17	46	32	14	18	10	8	12	5	7	2	1	1
2	Kab. Bangka Barat	364	184	180	45	16	29	110	0	110	3	0	3	7	0	7	6	0	6	1	1	0	137	128	9	36	27	9	9	6	3	9	5	4	1	1	0
3	Kab. Bangka Tengah	313	132	181	69	7	62	56	0	56	8	0	8	29	0	29	8	0	8	1	1	0	99	90	9	29	21	8	8	7	1	5	5	0	1	1	0
4	Kab. Belitung	265	163	102	43	14	29	42	2	40	7	0	7	0	0	7	0	7	1	1	0	120	114	6	29	21	8	7	4	3	8	6	2	1	1	0	
5	Kota Pangkalpinang	255	94	161	63	7	56	14	0	14	14	0	14	16	0	16	8	0	8	1	1	0	90	66	24	27	10	17	10	4	6	10	5	5	2	1	1
6	Kab. Bangka Selatan	253	154	99	58	14	44	28	0	28	2	0	2	1	0	1	10	0	10	1	1	0	96	93	3	37	30	7	12	9	3	7	6	1	1	1	0
7	Kab. Belitung Timur	236	152	84	27	17	10	58	0	58	2	0	2	3	0	3	4	0	4	0	0	0	104	103	1	23	22	1	6	5	1	8	4	4	1	1	0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2,14</b>	<b>1,1</b>	<b>1,04</b>	<b>380</b>	<b>83</b>	<b>297</b>	<b>396</b>	<b>2</b>	<b>394</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>760</b>	<b>69</b>	<b>227</b>	<b>163</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Sumber: dapodik 2022

### C. Kepemilikan Akta

Kepemilikan Akta kelahiran merupakan hak anak yang mendasar yang harus dipenuhi mengingat pentingnya akte kelahiran sebagai identitas anak. Tanpa memiliki akta kelahiran maka anak beresiko dalam memperoleh hak haknya sebagai warga Negara dan sebagai anak Indonesia. Mengingat pentingnya akta kelahiran maka tiap wilayah harus mengusahakan agar setiap anak harus memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akte kelahiran di provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepemilikan Akta Kelahiran

**Tabel V. 6** Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	% Kepemilikan Akta Kelahiran
1	Kab. Bangka	101.311	103.590	97,80%
2	Kab. Belitung	53.737	54.347	98,88%
3	Kab. Bangka Selatan	63.838	63.975	99,79%
4	Kab. Bangka Tengah	65.873	66.438	99,15%
5	Kab. Bangka Barat	65.866	67.661	97,35%
6	Kab. Belitung Timur	37.275	37.423	99,60%
7	Kota Pangkalpinang	72.850	74.018	98,42%
8	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>460.750</b>	<b>467.452</b>	<b>98,57%</b>

Dari hasil perhitungan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh **persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 98,57%**.

---

2. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting Lainnya

**Tabel V. 7** Jumlah Kepemilikan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting lainnya berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan, pengesahan dan peristiwa penting lainnya.

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting Lainnya
1	Kab. Bangka	227
2	Kab. Belitung	1.260
3	Kab. Bangka Selatan	41
4	Kab. Bangka Tengah	92
5	Kab. Bangka Barat	338
6	Kab. Belitung Timur	16
7	Kota Pangkalpinang	1.327
8	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>3.301</b>

Dari data yang diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan anak yang dikeluarkan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 2.054 akta

**D. Data status Perkawinan pada anak (usia <18 tahun) di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023**

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Berdasarkan data dari KPPA tahun 2018 Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF (2018) berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah ASEAN berada pada peringkat ke -2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak, antara lain adalah:

- Tingkat Pendidikan; pendidikan merupakan factor penting dalam mencegah pernikahan usia anak. Bahkan akhir-akhir ini muncul paradigma yang menyebutkan bahwa semakin banyak anak yang bersekolah maka pernikahan usia anak akan semakin menurun. Menyelesaikan sekolah hingga wajar 12 tahun, bahkan dilanjutkan ke perguruan tinggi, dapat melindungi anak dari pernikahan usia anak

- 
- Kemiskinan; factor ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang memiliki banyak utang ataupun berada dibawah garis kemiskinan sering menjodohkan perempuan yang masih usia anak untuk dinikahkan dengan maksud dapat mengurangi beban keluarga. Masalah ekonomi juga sering menjeruskan anak terutama anak perempuan ke pergaulan yang tidak semestinya, sehingga pada akhirnya memaksa mereka untuk melakukan pernikahan usia anak.
  - Kritik Sosial; anggapan bahwa anak di atas 15 tahun 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga akan segera mencarikan jodoh untuk anak perempuannya
  - Budaya/ Tradisi/ Kepercayaan; Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan, sehingga pernikahan usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dasar melindungi harkat dan martabat anak perempuan
  - Ikatan Keluarga; Perkawinan atau pertunangan/ perjodohan anak-anak di beberapa daerah merupakan salah satu penyebab pernikahan usia anak. Hal ini dinilai sebagai cara untuk mengkonsolidasikan hubungan yang kuat antara keluarga, untuk menyegel kesepakatan atas tanah atau properti lainnya, atau bahkan untuk menyelesaikan perselisihan. Pernikahan juga bisa menjadi cara untuk mempertahankan hubungan etnis atau komunitas

Dan banyak lagi penyebab yang bisa dianggap sebagai pemicu munculnya pernikahan usia anak.

Di Provinsi kepulauan Bangka Belitung Pernikahan usia anak masih cukup tinggi. Bahkan data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Bangka Belitung menduduki urutan pertama pernikahan anak terbanyak di Indonesia. Tingginya angka pernikahan usia anak ini memiliki dampak terhadap tingginya angka stunting, tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak, serta tingginya angka perceraian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan akhir bulan Desember 2022, provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan berada di urutan kelima terbanyak pernikahan usia anak. Berikut data pernikahan anak di Bangka Belitung

**Tabel V. 8 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) di Bangka Belitung dari tahun 2018 s.d 2022**

NO	Provinsi	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	KEP. BANGKA BELITUNG	14.22	15.48	18.76	14.05	7,91	8,93
	INDONESIA	11.21	10.82	10.35	9.23	8,03	6,92

Sumber: BPS, 2022

Dari data di atas jika dibandingkan dari besaran capaian pertahun Bangka Belitung sudah mengalami perbaikan dalam hal menekan pernikahan usia anak. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 Bangka Belitung sendiri capaiannya berada diatas nasional hal ini merupakan prestasi yang tidak baik. Karena nilai persentase yang baik adalah semakin kecil capaian semakin baik tingkat pernikahan anak di satu daerah. Tercatat untuk tahun 2022 persentase capaian Bangka Belitung sebesar 7,91 sementara Nasional sebesar 8,03 persen. Hal ini merupakan prestasi karena hampir 3 tahun berurutan Bangka Belitung masuk di 10 besar pernikahan anak terbanyak. Di tahun 2023 ternyata capaian Bangka Belitung kembali merosot dan kembali berada di sepuluh besar dengan capaian 8,93 dan lebih tinggi dari capaian nasional yaitu sebesar 6,92. hal ini tentunya kembali menjadi pekerjaan rumah bersama dalam rangka menutunkan kembali angka pernikahan anak di Bangka Belitung.

## E. Kesehatan Anak

### I. Kematian

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

---

a) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi saat setelah bayi lahir sampai bayi berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel V.9 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate)*

WILAYAH	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	IMR/AKB
BANGKA	5.236	44	8,40
BELITUNG	2.776	39	14,05
BANGKA SELATAN	2.807	18	6,41
BANGKA TENGAH	3.291	23	6,99
BANGKA BARAT	3.294	28	8,50
BELITUNG TIMUR	1.788	22	12,30
PANGKALPINANG	3.922	16	4,08
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	23.114	190	8,22

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Dari tabel terlihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi kematian bayi sebanyak 8 bayi.

b) Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian neonatal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.10 Angka Kematian Neonatal (NNDR)

WILAYAH	Kelahiran Hidup	Kematian Neonatal	AK Neonatal
BANGKA	5.236	33	6,30
BELITUNG	2.776	20	7,20
BANGKA SELATAN	2.807	15	5,34
BANGKA TENGAH	3.291	16	4,86
BANGKA BARAT	3.294	26	7,89
BELITUNG TIMUR	1.788	15	8,39
PANGKALPINANG	3.922	14	3,57
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	23.114	139	6,01

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari tabel di atas diketahui bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 terjadi 6 kematian bayi neonatal dari 1.000 kelahiran hidup.

c) Kematian Post Neonatal (angka kematian lepas baru lahir/PNNDR)

Kematian Post Neonatal (*Post Neo-Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Tabel V.11 Angka kematian post neonatal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

WILAYAH	Kelahiran Hidup	Kematian Post Neonatal	AK Post Neonatal
BANGKA	5.236	11	2,10
BELITUNG	2.776	19	6,84
BANGKA SELATAN	2.807	3	1,07
BANGKA TENGAH	3.291	7	2,13
BANGKA BARAT	3.294	2	0,61
BELITUNG TIMUR	1.788	7	3,91
PANGKALPINANG	3.922	2	0,51
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	23.114	51	2,21

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dengan AK Post Neonatal sebesar 2 menunjukkan bahwa terjadi kematian bayi post neonatal dari 1.000 kelahiran hidup.

d) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun. Angka

---

kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

Tabel V.12 Angka Kematian Balita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

WILAYAH	Penduduk Usia <5 Tahun pada Tahun 2022	Kematian Balita	AK Balita
BANGKA	24.777	45	1,82
BELITUNG	14.036	45	3,21
BANGKA SELATAN	14.667	18	1,23
BANGKA TENGAH	15.659	25	1,60
BANGKA BARAT	15.299	34	2,22
BELITUNG TIMUR	9.396	26	2,77
PANGKALPINANG	20.100	18	0,90
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	113.934	211	1,85

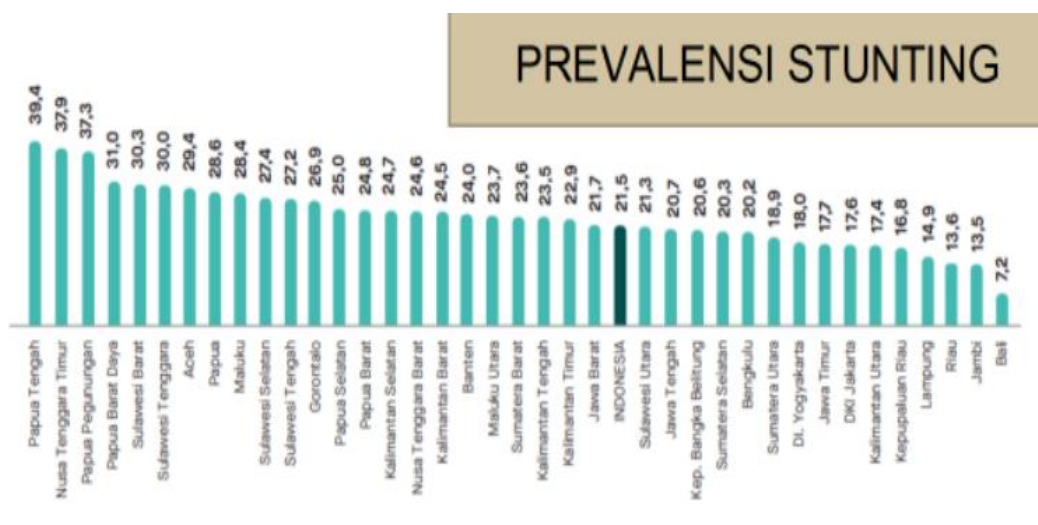
*Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas P3A, Dukcapil dan PPKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah*

Angka kematian balita sebesar 1,85 memberikan makna bahwa pada tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 1.000 balita terjadi 2 kematian balita

## II. Stunting

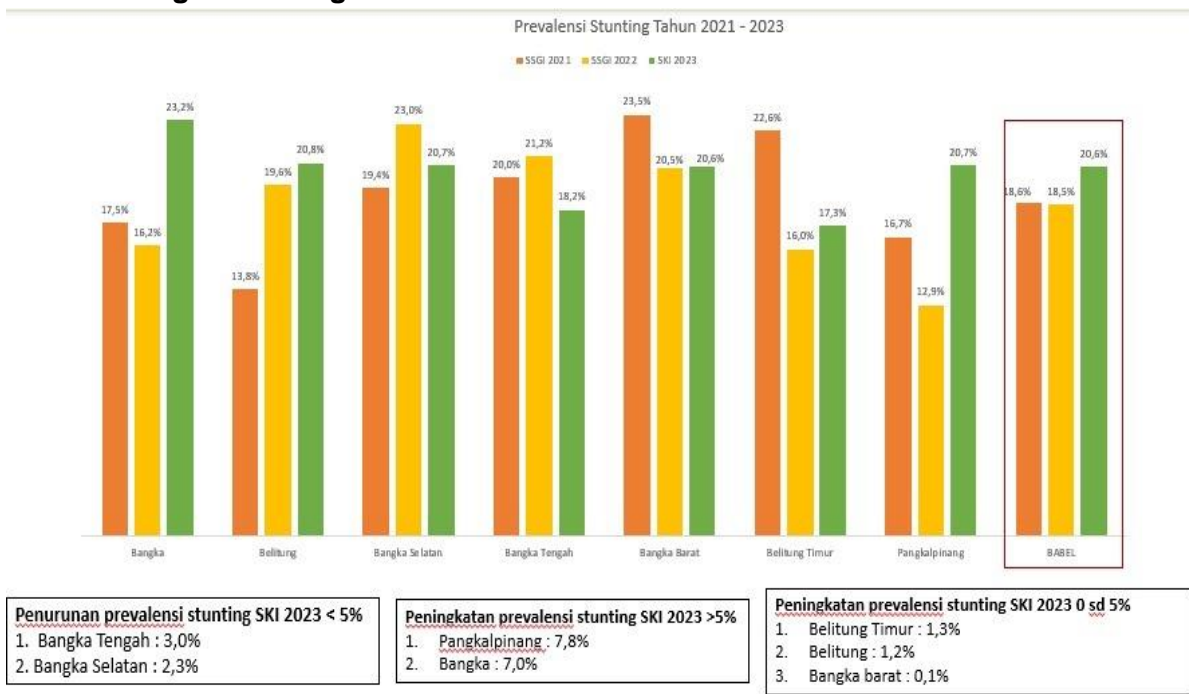
Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Oleh karena itu data yang diperlukan untuk identifikasi stunting adalah dengan melihat stunting pada usia bawah dua tahun (baduta) dan usia bawah lima tahun (balita). Prevalensi stunting di Kepulauan Bangka Belitung dapat terlihat pada tabel ini:

**Gambar. V.4 Prevalensi Balita stunting di provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2023**



Kejadian stunting di bangka belitung tahun 2023 sebesar 20,6%. Itu artinya 1 dari 5 anak (balita) yang diukur di bangka belitung terkena stunting. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 18,5 (tahun 2022) dan 18,6 (tahun 2021).

**Gambar. V.5 Prevalensi Balita stunting Perkab/kota di provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021- 2023**



Sumber: SSGI, 2024

Dari gambar grafik diatas terlihat tren peningkatan dan penurunan angka balita stunting dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Kepulauan Bangka Belitung

---

dengan catatan bahwa pada tahun 2021 prevalensi balita stunting berada di angka 18,5 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 18,6 dan kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023 yaitu menjadi 20,6. Sementara pada tahun 2023 Kabupaten Bangka merupakan penyumbang angka tertinggi dengan prevalensi 23,2, sementara Belitung Timur sebagai daerah terendah dengan prevalensi 17,3.

**BAB VI**  
**GAMBARAN KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**  
**DI BANGKA BELITUNG**

Dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 G ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia. Dengan setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan serta dijamin oleh konstitusi. Negara terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela serta menjamin hak asasi setiap orang termasuk anak-anak meskipun anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut maka setidaknya kekerasan dibagi kedalam 4 (empat) jenis yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Perlu kami jelaskan di sini bahwasanya 1 orang korban dapat mengalami lebih dari 1 atau 2 atau bahkan 3 bentuk kekerasan. Sebagai contoh seseorang yang mengalami kekerasan seksual bisa jadi mengalami kekerasan fisik dan psikis. Dalam bab ini akan kami uraikan kondisi kekerasan terhadap anak dan perempuan usia 18 tahun ke atas berdasarkan jenis/bentuk kekerasan sebagai berikut per kabupaten/kota.

Secara umum jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan usia diatas 18 Tahun dan anak yang dilaporkan selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel VI.1 sebagai berikut:

**Tabel VI.1 Rekap Data Korban Kekerasan Berdasarkan Jumlah Kasus yang terlapor Tahun 2023 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS ANAK		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PANGKALPINANG	15	21	36	JUMLAH KASUS ANAK BERDASARKAN JUMLAH KORBAN
2	BELITUNG	1	12	13	
3	BELITUNG TIMUR	8	8	16	
4	BANGKA SELATAN	0	5	5	
5	BANGKA TENGAH	3	20	23	
6	BANGKA	0	18	18	
7	BANGKA BARAT	3	14	17	
TOTAL		30	98	128	

NO.	KABUPATEN/KOTA	KASUS PEREMPUAN	KETERANGAN
1	PANGKALPINANG	46	JUMLAH KASUS PEREMPUAN BERDASARKAN JUMLAH KORBAN
2	BELITUNG	30	
3	BELITUNG TIMUR	11	
4	BANGKA SELATAN	4	
5	BANGKA TENGAH	10	
6	BANGKA	7	
7	BANGKA BARAT	6	
TOTAL		114	

Sumber: Data Simphoni PPA 2023

Sementara itu data korban kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dilihat pada table dibawah ini

**Tabel VI.2 Rekap Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Anak Dan Dewasa Tahun 2022 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO.	KABUPATEN/KOTA	ANAK		DEWASA		KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PANGKALPINANG	15	21	2	46	KORBAN
2	BELITUNG	1	12	0	30	
3	BELITUNG TIMUR	8	8	6	11	
4	BANGKA SELATAN	0	5	0	4	
5	BANGKA TENGAH	3	20	2	10	
6	BANGKA	0	18	0	7	
7	BANGKA BARAT	3	14	0	6	
TOTAL		30	98	10	114	252
		128		124		

Sumber: Data Simphoni PPA 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus terhadap anak sebanyak 128 kasus dengan jumlah korban sebanyak 128 orang, dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 144 kasus dengan jumlah korban sebanyak 144 orang sementara itu ada juga 10 orang laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Jika dianalisa, pada kasus kekerasan terhadap anak, jumlah korban dengan jumlah kasus berjumlah sama, hal ini dapat di indikasi bahwa satu kasus di alami oleh satu korban, begitu juga kasus perempuan antara kasus dan korban mempunyai jumlah yang sama.

Dari data tersebut untuk kasus kekerasan pada anak, kota Pangkalpinang menempati posisi teratas dengan jumlah kasus terbanyak yaitu sebanyak 36 kasus dengan jumlah korban 36 orang, posisi kedua Kabupaten Bangka Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 23 kasus dengan jumlah korban 23 orang, dan posisi ketiga Kabupaten Bangka dengan jumlah kasus 18 dan jumlah korban 18 orang, selanjutnya Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah kasus 17 dan jumlah korban 17 orang, Kemudian Kabupaten Belitung Timur jumlah kasus 16 jumlah korban 16 orang, disusul Belitung dengan jumlah kasus 13 jumlah korban 13 orang dan terakhir Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah kasus 5 kasus dan jumlah korban 5 orang.

#### **A. Gambaran kondisi kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban**

Berdasarkan data simphoni PPA jenis kekerasan dikelompokkan atas 6 (enam) jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, eksploitasi dan kekerasan lainnya. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Seseorang yang menderita kekerasan fisik harus mendapatkan pengobatan secara medis oleh dokter.

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada diri seseorang. Seseorang yang mengalami kekerasan psikis biasanya karena guncangan jiwa yang dialami akibat kekerasan yang menimpanya apakah akibat dari kekerasan fisik atau seksual.

Kekerasan Seksual adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat mengerikan.

Traficking atau perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang mengandung unsur pemaksaan. Eksploitasi tidak hanya terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Kekerasan lainnya yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori kekerasan di atas, misalnya pengeroyokan dll. Tabel di bawah ini menyajikan data kekerasan terhadap anak berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban.

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah anak usia 18 tahun ke bawah yang menjadi

**Tabel VI.3. Data Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KORBAN YANG DILAPORKAN	BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI							JUMLAH	KET
			FISIK	PSIKIS	PENELANTARAN	SEKSUAL	TRAFFICKING	EKSPLORITASI	LAINNYA		
1	PANGKALPINANG	36	14	2	0	18	1	0	2	37	1 ORANG KORBAN DAPAT MENGALAMI 1 (SATU) ATAU LEBIH BENTUK KEKERASAN
2	BELITUNG	9	0	3	2	7	0	0	0	12	
3	BELITUNG TIMUR	17	0	16	0	15	1	0	0	32	
4	BANGKA SELATAN	14	2	2	0	9	0	0	1	14	
5	BANGKA TENGAH	5	0	1	0	5	0	0	0	6	
6	BANGKA	13	1	3	3	8	0	0	0	15	
7	BANGKA BARAT	6	2	3	0	3	0	0	1	9	
TOTAL		100	19	30	5	65	2	0	4	125	

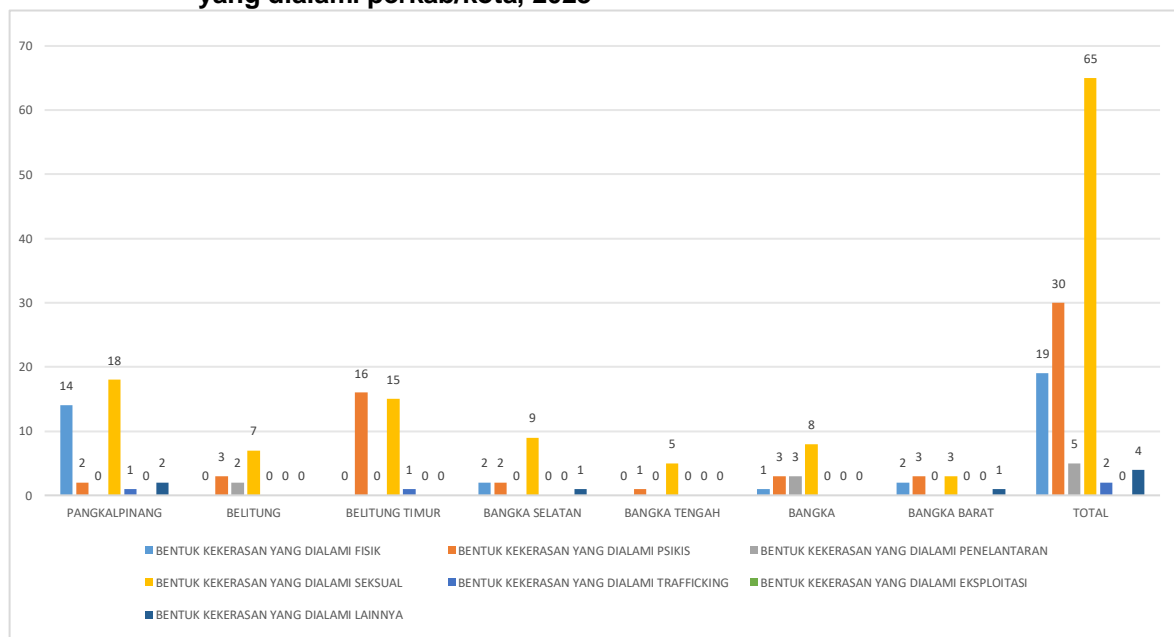
Sumber data : Simphoni PPA 2023

korban kekerasan yang dilaporkan adalah sebanyak 100 orang dengan jumlah variasi bentuk kekerasan yang dialami adalah sebanyak 125 bentuk kekerasan. Ini memberi arti bahwa ada 1 korban biasanya tidak hanya mendapatkan 1 macam/bentuk kekerasan saja, misalnya pada kasus kekerasan fisik ternyata korbannya juga mengalami kekerasan psikis. Demikian juga dengan kekerasan seksual yang biasanya diiringi dengan kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan tabel di atas, Pangkalpinang menempati posisi teratas dengan jumlah korban kekerasan terbanyak yang dilaporkan dengan bentuk kekerasan yang dialami, disusul Belitung timur dan Bangka. Melihat tabel di atas, jumlah korban kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bentuk kekerasan yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban 65 kejadian, disusul dengan kekerasan psikis sebanyak 30 kejadian dan kekerasan fisik sebanyak 19 kejadian. Bentuk kekerasan lain yang dialami juga oleh anak-anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penelantaran dan bentuk kekerasan lainnya dan trafficking. Namun 3 (tiga) bentuk kekerasan ini tidak banyak terjadi.

Secara diagram Batang untuk menjelaskan Kabupaten/Kota yang memiliki angka kekerasan terhadap anak berdasarkan bentuk kekerasan disajikan dalam bentuk diagram berikut:

**Gambar VI.1 Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami perkab/kota, 2023**



Sumber data : *Simphoni PPA 2023*

Bila diperhatikan dari tabel dan diagram di atas, angka kekerasan seksual memang menjadi tren tahun 2023 mengalahkan bentuk kasus kekerasan lainnya. Tiga Kabupaten/Kota teratas dengan kategori kasus kekerasan seksual tinggi yakni, Kabupaten Kota Pangkalpinang, Belitung Timur dan Kabupaten Bangka, Perhatikan modus operandi dari pelaku kekerasan seksual anak adalah rata-rata disebabkan karena pelaku sering melihat video porno dan karena pengaruh alkohol serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak perempuan sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Pada beberapa kasus, kekerasan seksual pada anak didahului dengan kekerasan fisik terlebih dahulu dengan membuat korban tidak berdaya.

**Tabel VI.4 Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan usia diatas 18 tahun berdasarkan bentuk kekerasan, 2023**

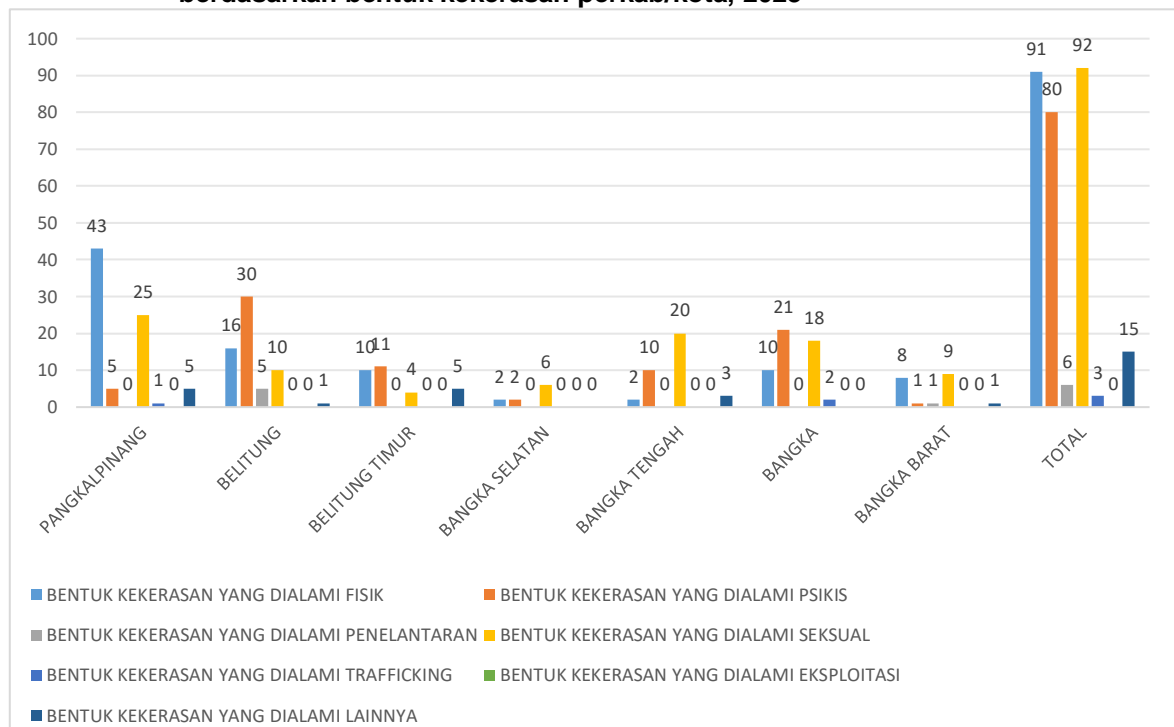
NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KORBA N YANG DILAPO RKAN	BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI							JUM LAH	KETER ANGA N
			FIS IK	PSI KIS	PENE LANT ARAN	SEK SUA L	TRAF FICKI NG	EKSP LOITA SI	LAI NNY A		
1	PANGKALPINANG	72	43	5	0	25	1	0	5	79	1 ORAN G KORB AN DAPAT MENG ALAMI 1 (SATU) ATAU LEBIH BENTU K KEKER ASAN
2	BELITUNG	42	16	30	5	10	0	0	1	62	
3	BELITUNG TIMUR	21	10	11	0	4	0	0	5	30	
4	BANGKA SELATAN	9	2	2	0	6	0	0	0	10	
5	BANGKA TENGAH	30	2	10	0	20	0	0	3	35	
6	BANGKA	25	10	21	0	18	2	0	0	51	
7	BANGKA BARAT	20	8	1	1	9	0	0	1	20	
TOTAL		219	91	80	6	92	3	0	15	287	

*imponi PPA, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah korban kekerasan yang dilaporkan pada perempuan usia di atas 18 tahun berjumlah 219 orang dengan variasi bentuk/jenis kelamin sebanyak 287 bentuk/jenis kekerasan. Hal ini sama dengan kasus kekerasan yang terjadi pada anak, dimana 1 korban maka akan mendapat lebih dari 1 macam kekerasan. Adapun bentuk/jenis kekerasan yang terbanyak dialami oleh korban perempuan usia di atas 18 tahun adalah bentuk/jenis kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 92 kasus, disusul jenis kekerasan fisik sebanyak 91 kasus, kemudian psikis 80 kasus, 15 jenis kekerasan lainnya, penelantaran 6 kasus, Trafficking 3 kasus. Dari jenis kekerasan fisik, korban yang terbanyak adalah di Kota pangkalpinang sebanyak 43 kasus, disusul Kabupaten Belitung 16 kasus kemudian Kabupaten Bangka dan Belitung Timur sebanyak masing-masing 10 kasus. Untuk jenis kekerasan psikis didominasi oleh Kabupaten Belitung dengan jumlah kasus sebanyak 30 kasus disusul Bangka 21 kasus dan Belitung Timur 11 kasus. Untuk kekerasan seksual Pangkalpinang terbanyak dengan 25 kasus, disusul Bangka Tengah 20 kasus dan Bangka 18 Kasus. Untuk jenis kekerasan penelantaran banyak terjadi disebabkan karena kasus perceraian atau suami tidak memberi nafkah pada keluarga. Berdasarkan tabel di atas, ditemukan jenis kekerasan trafficking pada perempuan usia 18 tahun keatas dengan jumlah 3 kasus.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan bentuk/jenis kekerasan pada 7 kab/kota adalah sebagai berikut:

**Gambar VI.2 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan usia 18 tahun ke atas berdasarkan bentuk kekerasan perkab/kota, 2023**



Sumber Data: Simphoni PPA, 2023

Berdasarkan gambar di atas, baik jenis kekerasan fisik dan seksual paling banyak terjadi di Kota Pangkalpinang, Bangka dan Bangka Tengah, kemudian Belitung.

## B. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Usia Korban dan Jenis Kelamin

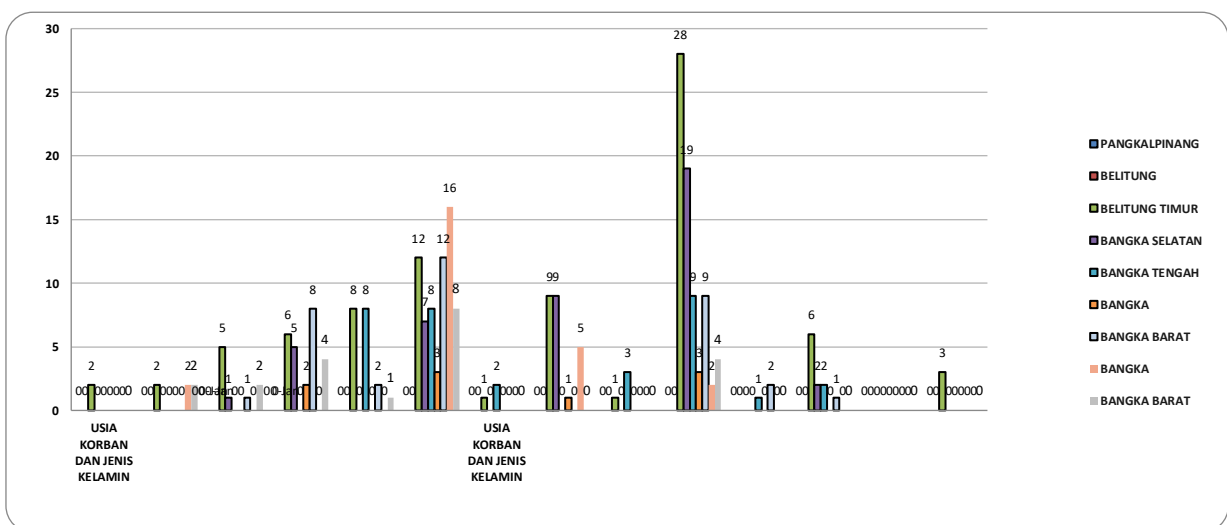
Pentingnya membahas bagaimana kondisi kekerasan berdasarkan usia korban dan jenis kelamin adalah untuk mengetahui jenis kelamin dan usia korban yang rentan terhadap tindak kekerasan. Pengelompokan berdasarkan usia korban dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu usia 0-5 tahun, usia 6-12 tahun, usia 13-17 tahun, usia 18-24 tahun, usia 25-44 tahun, usia 45-59 dan usia di atas 60 tahun. Untuk melihat kondisi korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan usia korban dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI.5 Jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, 2023**  
 Sumber data: Shimponi PPA, 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	USIA KORBAN DAN JENIS KELAMIN						USIA KORBAN DAN JENIS KELAMIN								JUMLAH KORBAN	KET
		0-5		6-12		13-17		18-24		25-44		45-59		60+			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	PANGKALPINANG	2	2	5	6	8	12	1	9	1	28	0	6	0	3	KORBAN	
2	BELITUNG	0	0	1	5	0	7	0	9	0	19	0	2	0	0		
3	BELITUNG TIMUR	0	0	0	0	8	8	2	0	3	9	1	2	0	0		
4	BANGKA SELATAN	0	0	0	2	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0		
5	BANGKA TENGAH	0	0	1	8	2	12	0	0	0	9	2	1	0	0		
6	BANGKA	0	2	0	0	0	16	0	5	0	2	0	0	0	0		
7	BANGKA BARAT	0	2	2	4	1	8	0	0	0	4	0	0	0	0		
	TOTAL	2	6	9	25	19	66	3	24	4	74	3	11	0	3	249	

Berdasarkan tabel di atas, yang menjadi korban kekerasan terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan yakni sebanyak 209 orang (84%). Hal ini disebabkan karena pada jenis kelamin perempuan, usia anak juga tergabung di dalamnya, yakni anak perempuan. Sedangkan korban dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 40 orang (16%).  
 Jika digambarkan dengan diagram batang, maka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar VI.3 Jumlah korban kekerasan berdasarkan usia dan jenis kelamin per kab/kota, 2023**



Sumber data: Simphoni PPA, 2023

Berdasarkan dari grafik di atas, ternyata dapat dibuktikan bahwa memang perempuan terbanyak menjadi korban. Contoh di Kota Pangkalpinang korban kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia 25-44 tahun. Tidak berbeda dengan kabupaten Belitung di korban kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia 25-44 tahun.

### C. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian

Tempat kejadian merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi indikator analisis terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Berdasarkan tempat kejadian, kasus kekerasan terhadap perempuan usia 18 tahun ke atas dan anak-anak dikategorikan menjadi 5 (lima) macam yaitu: rumah tangga, fasilitas umum, sekolah, tempat kerja dan lainnya. Tabel berikut ini akan menyajikan jumlah kekerasan pada anak-anak berdasarkan tempat kejadian.

**Tabel VI.6. Data Kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian, 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMPAT KEJADIAN PERKARA					JUMLAH	KET
		RUMAH TANGGA	FASILITAS UMUM	SEKOLAH	TEMPAT KERJA	LAINNYA		
1	PANGKALPINANG	18	8	1	0	7	34	KORBAN ANAK
2	BELITUNG	12	1	0	0	0	13	
3	BELITUNG TIMUR	2	10	2	0	2	16	
4	BANGKA SELATAN	4	1	0	0	0	5	
5	BANGKA TENGAH	10	0	2	0	2	14	
6	BANGKA	11	1	0	1	5	18	
7	BANGKA BARAT	11	1	3	0	0	15	
	TOTAL	68	22	8	1	16	115	

Sumber: Data Simphoni PPA, 2023

Berdasarkan tabel di atas berdasarkan tempat kejadian, kekerasan pada anak banyak terjadi di rumah tangga yakni sebanyak 68 kasus yang kedua adalah fasilitas umum sebanyak 22 kasus antara lain seperti di pantai, jalan, penginapan/hotel, tempat ibadah dan sebagainya. Disusul tempat kejadian lainnya sebanyak 16 kasus, yang dimaksud dengan tempat lainnya disini adalah misalnya di kebun, disemak-semak, di gedung/rumah kosong. Kemudian di sekolah sebanyak 8 kasus. Dan terakhir tempat kerja dengan jumlah 1 kasus. Berdasarkan data tersebut hendaknya para orang tua dapat memberikan pengawasan yang ketat kepada anak termasuk dimana tempat bermain mereka. Selain itu semua stakeholder yang terkait harus dapat memastikan fasilitas umum yang ada dapat memberikan rasa aman dan ramah bagi anak sehingga dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak.

Selain anak berikut ditampilkan juga data terkait kekerasan terhadap perempuan jika dilihat berdasarkan tempat kejadian perkara;

**Tabel VI.7. Jumlah kekerasan pada perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan tempat kejadian, 2023**

	KABUPATEN/KOTA	TEMPAT KEJADIAN PERKARA					TOTAL	KET
		RUMAH TANGGA	FASILITAS UMUM	SEKOLAH	TEMPAT KERJA	LAINNYA		
1	PANGKALPINANG	49	17	1	1	9	77	KORBAN
2	BELITUNG	16	1	0	1	0	18	
3	BELITUNG TIMUR	8	10	2	0	3	23	
4	BANGKA SELATAN	13	1	0	0	1	15	
5	BANGKA TENGAH	13	0	2	0	2	17	
6	BANGKA	41	1	0	1	5	48	
7	BANGKA BARAT	19	1	3	0	0	23	
	TOTAL	159	31	8	3	20	221	

Sumber data: Simphoni PPA, 2023

Berdasarkan tabel di atas, kekerasan pada perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan tempat kejadian banyak terjadi di rumah tangga yaitu sebanyak 159 kasus, kemudian disusul tempat kejadian fasilitas umum sebanyak 31 kasus dan sebanyak 20 kasus terjadi di tempat lainnya. Data di atas memberikan gambaran pada kita bahwa masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Bangka Belitung.

#### D. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Hubungan/Relasi Korban dengan Pelaku

Menganalisis kasus kekerasan berdasarkan hubungan/relasi pelaku dengan korban sangatlah penting karena terkadang korban/keluarga korban tidak menyadari bahwa pelaku memiliki niat buruk terhadap anggota keluarganya. Berdasarkan hubungan/relasi korban dengan pelaku di bedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu: hubungan suami dan istri, hubungan pacar/teman, hubungan orang tua, hubungan keluarga/saudara, guru, tetangga dan lainnya.

Berikut ini disajikan jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan hubungan korban dengan pelaku.

**Tabel VI.8. Jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan hubungan/relasi korban dengan pelaku, 2023 (salah NI)**

NO	KABUPATEN/KOTA	HUBUNGAN PELAKU DENGAN KORBAN									JUMLAH	KETERANGAN
		SUAMI/ISTRI	PACAR/TEMAN	ORANG TUA	KELUARGA/SAUDARA	GURU	TETANGGA	MAJIKAN	REKAN KERJA	LAINNYA		
1	PANGKALPINANG	20	3	0	0	1	2	0	1	5	32	
2	BELITUNG	1	2	0	1	0	1	0	0	2	7	
3	BELITUNG TIMUR	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	
4	BANGKA SELATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	5	6	
5	BANGKA TENGAH	0	1	0	0	1	1	0	0	5	8	
6	BANGKA	0	10	0	0	0	1	0	0	4	15	
7	BANGKA BARAT	0	2	0	0	0	0	0	0	6	8	
	TOTAL	21	18	0	1	3	6	1	1	28	79	

Sumber data: Simphoni PPA, 2023

Berdasarkan tabel di atas, kekerasan pada anak berdasarkan hubungan korban dengan pelaku banyak terjadi/dilakukan oleh yang tidak dikenal atau lainnya 28 kasus kemudian suami/istri 21 kasus pacar/teman yaitu sebanyak 18 kasus. Disamping itu juga banyak dilakukan oleh orang terdekat seperti tetangga yaitu sebanyak 6 kasus bahkan keluarga /saudara ada 1 kasus. Berdasarkan data di atas tren menunjukkan bahwa yang semula dominan pelaku kekerasan adalah merupakan orang yang sudah mengenal korban bahkan bisa jadi orang terdekat dengan korban kini berganti ke orang yang tidak dikenal/ lainnya.

Berikut ini disajikan juga data Jumlah kekerasan pada perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan hubungan pelaku dengan korban dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel VI.9 Jumlah korban kekerasan pada perempuan usia di atas 18 tahun berdasarkan hubungan pelaku dengan korban, 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	HUBUNGAN PELAKU DENGAN KORBAN									JUMLAH	KETERA NGAN
		SU AMI /IST RI	PAC AR/T EMA N	ORA NG TUA	KELUA RGA/ SAUDA RA	GUR U	TETA NGGA	MAJI KAN	REK AN KERJ A	LAI NN YA		
1	PANGKALPINANG	20	3	0	0	1	2	0	1	5	32	
2	BELITUNG	2	2	0	1	0	1	0	0	2	8	
3	BELITUNG TIMUR	2	2	0	0	0	1	1	0	1	7	
4	BANGKA SELATAN	5	0	0	0	1	1	0	1	8	16	
5	BANGKA TENGAH	3	1	0	0	1	1	0	0	5	11	
6	BANGKA	27	11	0	0	0	1	0	0	6	45	
7	BANGKA BARAT	6	2	0	0	0	0	0	0	7	15	
	TOTAL	65	21	0	1	3	7	1	2	34	134	

*Sumber data: Simphoni PPA, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah korban kekerasan berdasarkan hubungan pelaku dengan korban adalah banyak terjadi/dilakukan oleh suami-istri yaitu sebanyak 65 kasus. Ini senada dengan kekerasan yang terjadi berdasarkan tempat yakni paling banyak dilakukan dalam rumah tangga. Dengan demikian artinya kasus KDRT paling mendominasi di tahun 2023. Selain hubungan suami-istri juga kekerasan dilakukan karena hubungan lainnya seperti pacar dan korban yang disebabkan oleh pecar/teman sebanyak 21 kasus. Selain itu hubungan dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan khusus dengan korban yakni seperti yang dilakukan oleh tetangga yaitu sebanyak 2 korban dan terakhir oleh orang yang tidak dikenal yaitu sebanyak 34 Kasus.

---

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data yang telah dikemukakan pada buku profil gender dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maka yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tahun ke tahun tingkat kesadaran perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan bahkan berbakti berbangsa dan bernegara dalam rangka memperbaiki kesejahteraan kehidupannya semakin meningkat. Kaum perempuan jika diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki maka akan menjadi potensi yang berharga dan dapat dikembangkan guna pembangunan daerah dari sisi ekonomi, sosial, hingga politik.

Selain perempuan, perhatian bersama masyarakat dan pemangku kebijakan baik di level pemerintah maupun adat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam kondisi masyarakat yang kondusif ditambah dengan perhatian pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi anak memperoleh hak-hak mereka maka anak akan berkembang menjadi generasi penerus yang nantinya akan memajukan daerah. Maka dari itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan mampu mengakomodir kepentingan perempuan dan anak karena mereka adalah potensi daerah yang mampu memberikan dampak yang signifikan jika mampu diberdayakan sesuai pada kodratnya.

### **B. Saran**

Dalam upaya perbaikan kedepan terhadap substansi penyajian ataupun ekspose data profil gender dibutuhkan komitmen bersama, keseriusan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya dari seluruh SKPD sehingga tujuan penyusunan profil gender sebagai penyedia data yang up to date dan berkualitas dapat tercapai.

---